

**ANALISIS RASIONALITAS TINDAKAN PEMERINTAH KABUPATEN
BLITAR TERHADAP ILEGALITAS USAHA POM MINI**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dengan Minat Utama Inovasi Pemerintahan

Oleh

Satya Dharma Susanto

NIM 145120600111012



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS RASIONALITAS TINDAKAN PEMERINTAH KABUPATEN
BLITAR TERHADAP ILEGALITAS USAHA POM MINI**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Satya Dharma Susanto

NIM. 145120600111012

Telah Disetujui Oleh Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ratnaningsih Damayanti, S.IP, M.Ec.Dev.
NIK. 20140586092112001

Laode Machdani Afala, S.IP., M.A
NIK. 2016078703181001

LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS RASIONALITAS TINDAKAN PEMERINTAH KABUPATEN
BLITAR TERHADAP ILEGALITAS USAHA POM MINI

SKRIPSI

Disusun Oleh:
Satya Dharma Susanto
NIM. 145120600111012

Telah diuji dan dinyatakan LULUS dalam Ujian Sarjana Ilmu Politik
Pada Tanggal 11 Desember 2018

Tim Penguji

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Majelis Penguji

Tia Subekti, S.IP., MA

Rizqi Bachtiar, S.AP., MPA

NIP. 199206202018032001

NIK. 2018079005111001

Anggota Majelis Penguji 1

Anggota Majelis Penguji 2

Ratnaningsih Damavanti, S.IP, M.Ec.Dev

Laode Machdani Afala, S.IP., M.A

NIK. 20140586092112001

NIK. 2016078703181001

Malang, 11 Desember 2018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof.Dr. Unti Ludigdo., SE., M.Si, Ak

NIP.196908141994021001

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Satya Dharma Susanto

NIM : 145120600111012

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul “Analisis Rasionalitas Tindakan Pemerintah Kabupaten Blitar Terhadap Ilegalitas Usaha Pom Mini” adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan merupakan karya saya dalam skripsi tersebut telah diberi tanda citasi serta ditunjukkan dalam lembar Daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 11 Desember 2018
Yang Memberi Pernyataan,

Satya Dharma Susanto
NIM. 145120600111012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas rahmat dan nikmat yang Allah SWT berikan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Rasionalitas Tindakan Pemerintah Kabupaten Blitar Terhadap Ilegalitas Usaha Pom Mini”. Skripsi ini ditulis sebagai persyaratan menempuh gelar Strata (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Skripsi ini merupakan sebuah karya yang tidak sempurna, maka dari itu selama proses penyelesaian peneliti telah banyak mendapat masukan. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat, kekuatan serta ridho-Nya kepada penulis, sehingga peneliti dapat melalui proses pengerjaan skripsi sampai dengan selesai.
2. Kedua orang yang sangat saya sayangi, Ibu dan Ayah. Susi Darmawanti dan Edy Susanto. Terimakasih telah mendidik dan membesarkan saya, Terimakasih untuk doa dan dukungan secara moril maupun materil. Terimakasih untuk segala yang engkau berikan sehingga saya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bertanggung jawab. Semoga dengan ini saya bisa membanggakan kalian berdua.
3. Saudari saya Putri Aprilia Susanto dan seluruh keluarga besar saya. Terimakasih telah menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas dukungan dan doa-doanya sekaligus memberikan motivasi kepada saya.

4. Untuk Anggun Masitoh, terima kasih banyak untuk dukungan dan doanya selama saya menempuh kuliah dan mengerjakan skripsi. Terima kasih untuk selalu ada untuk saya dan selalu memberikan semangat untuk saya.
5. Ibu Ratnaningsih Damayanti, S.IP, M.Ec.Dev dan Pak Laode Machdani Afala, S.IP., M.A selaku dosen pembimbing skripsi saya. Beliau adalah dosen yang sangat berperan dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih kepada bapak dan ibu yang sudah sabar dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi saya untuk selalu berusaha lebih baik lagi.
6. Ibu Tia Subekti, S.IP., MA dan Pak Risqi Bachtiar, S.AP., MPA selaku majelis penguji skripsi saya. Terimakasih telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi saya dan memberikan saran, masukan dan pertanyaan yang membangun dan membuat skripsi ini menjadi lebih baik lagi.
7. Kepala Program Studi dan Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan yang telah mengajarkan ilmu yang sangat berarti bagi saya, selama berkuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.
8. Untuk Teman-teman geng koplak, Indra, Captain Nanang, Haekal, Kemal, Damar Songgon, Dwiky, Berau, Bejo, serta Bagus dan Okoy yang selalu memberikan dukungan dan semangat ketika sebelum, ketika, dan setelah skripsi. Dan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada kalian semua yang sudah empat tahun lebih ini menjadi manusia-manusia pelipur lara baik dari omongan yang menyakitkan maupun dari candaan receh yang

tujuannya untuk menghibur kita semua di kala suka dan duka. Terimakasih waktunya, kalian semua bener-bener koplak dan tak akan dilupa !

9. Teman-teman Ilmu pemerintahan angkatan 2014 Kelas A Terimakasih sudah banyak membantu dan mendukung selama perkuliahan.
10. Kepada Informan saya selama melakukan penelitian, terimakasih sudah mau memberikan informasi yang menunjang skripsi saya hingga saya bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan manfaat dalam memberikan kontribusi pada perkembangan terkait ilegalitas usaha pom mini.

Malang, 11 Desember 2018

Penulis

Satya Dharma Susanto

ABSTRAK

Satya Dharma Susanto, 2018, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Analisis Rasionalitas Tindakan Pemerintah Kabupaten Blitar Terhadap Ilegalitas Usaha Pom Mini, Tim Pembimbing : Ratnaningsih Damayanti, S.IP.,M.Ec.Dev dan Laode Machdani Afala , S.IP., MA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasionalitas tindakan Pemerintah Kabupaten Blitar terhadap keberadaan ilegalitas usaha pom mini di Kabupaten Blitar. Penelitian ini menggunakan teori pilihan rasional yang dikemukakan oleh James S. Coleman. Teori milik Coleman ini memiliki dua unsur penting didalamnya yaitu aktor dan sumber daya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar belum melakukan tindakan yang semestinya sebagaimana kewenangan yang dimiliki terhadap kegiatan usaha pom mini. Pelimpahan kewenangan metrologi legal dari provinsi ke kota/kabupaten merupakan hal baru bagi Pemerintah Kabupaten Blitar sehingga memunculkan kesalahpahaman tindakan pengawasan terhadap pom mini. Pemerintah telah mengetahui bahwa usaha pom mini melanggar peraturan dan bahan dari pembuatan alat pom mini tidak berkualitas dan tidak layak untuk digunakan namun tidak dilakukan penindakan. Memajukan perekonomian daerah menjadi alasan bagi Pemerintah Kabupaten Blitar tidak melakukan penindakan terhadap pelaku usaha pom mini tetapi pemerintah juga tidak mendukung keberadaan usaha pom mini. Surat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur perihal alat ukur pertamini yang ditujukan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar untuk melakukan pengawasan secara terpadu secara persuasif masih belum dilakukan secara langsung kepada pelaku usaha pom mini.

Kata Kunci : Rasionalitas, Tindakan, Pertamina, Ilegalitas

ABSTRACT

Satya Dharma Susanto, 2018, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Brawijaya University, Analysis of the Rationality to the Action of the Blitar District Government Against the Illegality of Mini Pom Businesses
Advisory Team: Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M .Ec.Dev and Laode Machdani Afala , S.IP., MA

This study aims to analyze the rationality of Blitar District Government's actions towards the existence of illegality in mini pom businesses in Blitar Regency. This research uses rational choice theory proposed by James S. Coleman. Coleman's theory has two important elements in it, namely actors and resources. The research method used is descriptive qualitative research method. The results of this study show that the Blitar District Government has not taken the appropriate action as the authority possessed of the mini pom business activities. Delegation of the authority of legal metrology from the province to the city / regency is a new thing for the Blitar Regency Government, which raises a misunderstanding of the supervision of mini pom. The government has learned that the mini pom business violates the regulations and the material from the manufacture of mini pom tools is not qualified and is not feasible to use but no action is taken. Advancing the regional economy is a reason for the Blitar District Government not to take action against mini-business actors but the government also does not support the existence of mini-pom businesses. A letter from the Department of Industry and Trade of the Province of East Java concerning the first measuring instruments addressed to the Department of Industry and Trade of Blitar Regency to conduct integrated supervision in a persuasive manner is still not done directly to the mini pom business actors.

Keywords : *Rationality, Action, Pertamina, Illegality*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR ISTILAH	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1. Manfaat Akademis	11
1.4.2. Manfaat Praktis	12
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
2.2 Kerangka Teoritik.....	21
2.2.1. Teori Pilihan Rasional.....	21
2.3 Kerangka Pemikiran	27
BAB III	29
METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Fokus dan Lokasi Penelitian.....	30
3.3 Jenis Data dan Sumber Data.....	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data	32

3.4.1. Observasi.....	33
3.4.2. Wawancara.....	33
3.4.3. Dokumentasi	36
3.5 Teknik Analisis Data	36
BAB IV	40
GAMBARAN UMUM	40
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Blitar.....	40
4.1.1. Kondisi Demografi	43
4.1.2. Perekonomian Kabupaten Blitar	44
4.2. Pemerintah Kabupaten Blitar	48
4.2.1. Visi Misi Kabupaten Blitar	49
4.3. Usaha Pom Mini Di Kabupaten Blitar	51
4.3.1. Rasionalitas Masyarakat Kabupaten Blitar Memilih Usaha Pom Mini	53
BAB 5	60
PEMBAHASAN	60
5.1. Aktor dan Sumber Daya	60
5.2. Rasionalitas Tindakan Pemerintah Kabupaten Blitar Terhadap Ilegalitas Usaha Pom Mini	66
BAB VI	87
PENUTUP.....	87
6.1. Kesimpulan.....	87
6.2. Rekomendasi	88
Daftar Pustaka	91
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Alur Pikir Penelitian	28
Bagan 3.1 Komponen-Komponen Analisis Data : Model Interaktif	37
Bagan 5.1 Pemetaan Aktor Pemerintah Kabupaten Blitar	61
Bagan 5.2 Alternatif Pilihan Pemerintah Kabupaten Blitar	73



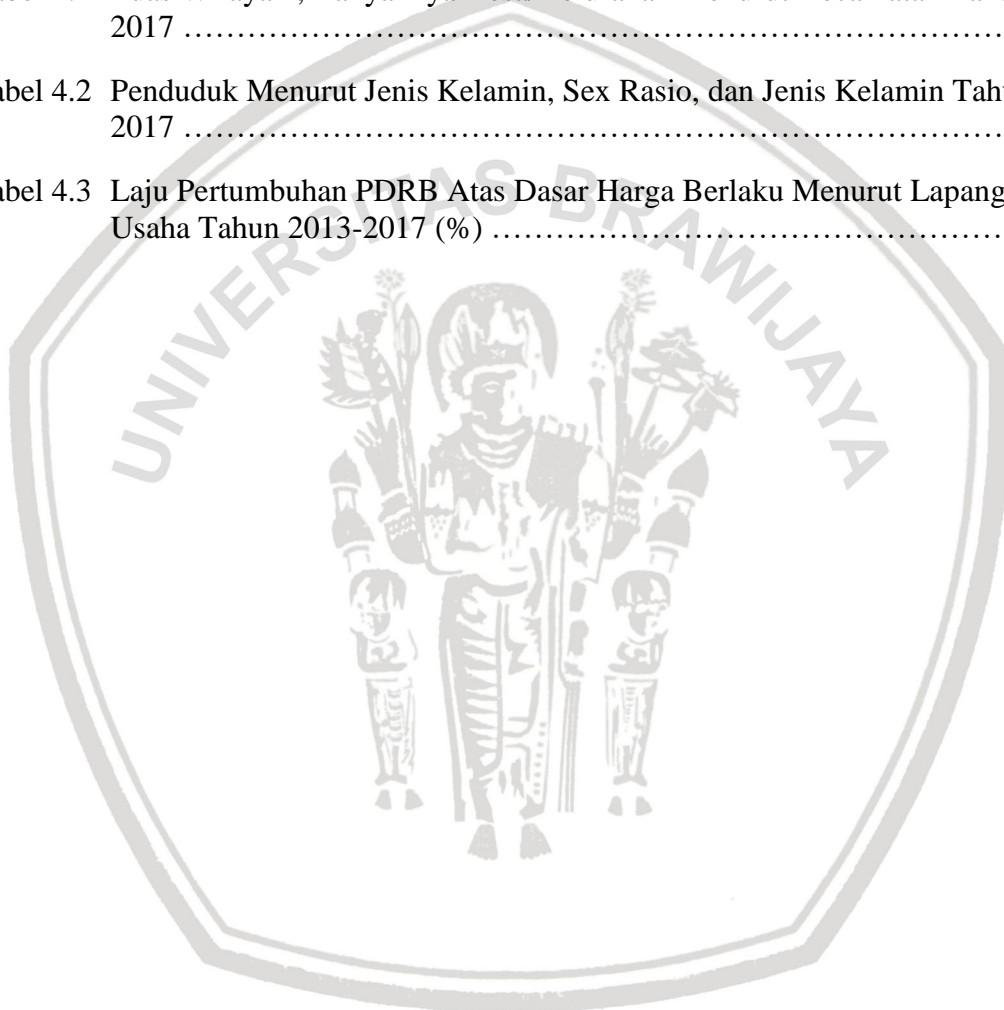
DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Blitar.....	41
Gambar 5.1 Situs Internet Penjual Pertamina	57



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar SPBU di Kabupaten Blitar	4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3.1	Daftar Informan Penelitian	35
Tabel 4.1	Luas Wilayah , Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan Tahun 2017	42
Tabel 4.2	Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Sex Rasio, dan Jenis Kelamin Tahun 2017	43
Tabel 4.3	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (%)	45



DAFTAR ISTILAH

Aktor	: Seseorang yang memiliki kewenangan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya.
BBM	: Singkatan dari bahan bakar minyak
Disperindag	: Singkatan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dokumentasi	: Proses pengumpulan atau penyimpanan informasi dan data.
Eceran	: Menjual atau membeli barang secara satu-satu atau sedikit-sedikit.
Ilegal	: Tidak legal atau menurut hukum tidak sah
Informan	: Orang yang menjadi sumber data dalam penelitian
Inovasi	: Penemuan baru yang sebelumnya yang berbeda dari penemuan sebelumnya.
Kegiatan Usaha Hilir	: kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau niaga.
Legal	: Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan atau hukum
Metode	Cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki
Metrologi Legal	: metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang.
Migas	: Singkatan dari minyak dan gas bumi
Motif	: Alasan atau sebab seseorang melakukan sesuatu
Nozzle	: Corong atau alat keluarnya bahan bakar minyak dari pom
Observasi	: Teknik pengumpulan data kualitatif.
Pertamini	: Sebutan yang digunakan oleh pengusaha pom mini untuk melabeli usaha pom mini dan merupakan plesetan dari PT. Pertamina (Persero).
Pom Mini	: Alat yang digunakan untuk memperjual belikan bahan bakar minyak eceran. Bentuknya menyerupai pom di SPBU namun memiliki kualitas yang tergolong rendah.
Preferensi	: Prioritas atau hak untuk didahulukan dan diutamakan daripada yang lain
Rasional	: Sebuah anggapan yang menurut pikiran dan pertimbangan yang logis.
SNI	: Singkatan dari Standar Nasional Indonesia.

Sosialisasi	: Upaya memberikan sebuah informasi kepada masyarakat sehingga dapat dikenal, dipelajari dan dipahami.
RCT	: Singkatan dari <i>Rational Choice Teory</i>
SPBU	: Singkatan dari stasiun pengisian bahan bakar umum
Sumber Daya	: Hal yang dimiliki oleh aktor, dapat berupa barang, keterampilan, kewenangan atas jabatan dan sebagainya.
Tera	: Cap pengujian yang dibubuhkan oleh Jawatan Tera pada timbangan, takaran dan ukuran yang dipakai dalam perdagangan.
UTTP	: Singkatan dari Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya.



LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS RASIONALITAS TINDAKAN PEMERINTAH KABUPATEN
BLITAR TERHADAP ILEGALITAS USAHA POM MINI**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Satya Dharma Susanto

NIM. 145120600111012

Telah Disetujui Oleh Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Ratnaningsih Damayanti, S.IP, M.Ec.Dev.
NIK. 20140586092112001



Laode Machdani Afala, S.IP., M.A
NIK. 2016078703181001

LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS RASIONALITAS TINDAKAN PEMERINTAH KABUPATEN
BLITAR TERHADAP ILEGALITAS USAHA POM MINI

SKRIPSI

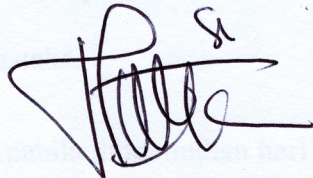
Disusun Oleh:
Satya Dharma Susanto
NIM. 145120600111012

Telah diuji dan dinyatakan LULUS dalam Ujian Sarjana Ilmu Politik

Pada Tanggal 11 Desember 2018

Tim Penguji

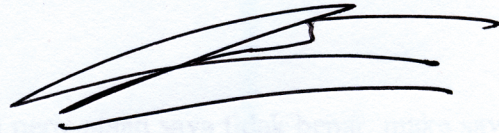
Ketua Majelis Penguji



Tia Subekti, S.IP., MA

NIP. 199206202018032001

Sekretaris Majelis Penguji



Rizqi Bachtiar, S.AP., MPA

NIK. 2018079005111001

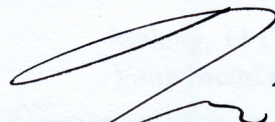
Anggota Majelis Penguji 1



Ratnaningsih Damayanti, S.IP, M.Ec.Dev

NIK. 20140586092112001

Anggota Majelis Penguji 2



Laode Machdani Afala, S.IP., M.A

NIK. 2016078703181001

Malang, 11 Desember 2018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Unti Ludigdo., SE., M.Si, Ak

NIP. 196908141994021001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahan bakar minyak atau sering disingkat BBM menjadi sebuah kebutuhan yang penting dalam kehidupan manusia. Bahan bakar minyak ini berasal dari minyak bumi atau minyak mentah. Minyak bumi melewati proses sedemikian rupa untuk dapat menjadi bahan bakar yang siap untuk digunakan. Perlu diketahui bahwa minyak bumi bersumber dari pelapukan makhluk hidup yang terjadi selama berabad-abad tahun yang lalu. Proses yang memakan waktu sangat lama tersebut membuat minyak bumi menjadi bahan energi yang tidak dapat diperbarui. Untuk mendapatkan minyak bumi dilakukan pihak perindustrian melakukan pengeboran, lokasinya bisa didarat (yang dulunya laut) atau laut lepas.¹ Biasanya minyak bumi dapat ditemukan dibawah permukaan yang berbentuk kubah. Pemanfaatan dari olahan minyak bumi tidak hanya diperuntukan untuk transportasi saja melainkan juga untuk kegiatan yang lainnya seperti LPG sebagai penunjang kehidupan dalam rumah tangga. Meskipun pemanfaatan untuk kegiatan transportasi lebih dominan.

Bahan bakar minyak dimanfaatkan untuk menggerakkan mesin kendaraan bermotor hingga saat ini. Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor baik kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi membuat permintaan akan bahan

¹ Hamdi. 2016. *Energi Terbarukan*, Kencana, Jakarta, hlm.14

bakar minyak juga meningkat. Mengingat penggunaan bahan bakar minyak saat ini masih menjadi pilihan utama sebagai sumber bahan bakar kendaraan bermotor sehingga membuat permintaan sumber energi ini juga semakin meningkat.

Pilihan alternatif lain dalam membuat sumber energi yang lebih ramah lingkungan masih sangat sulit dan memerlukan kendaraan bermotor yang tidak murah harganya. Saat ini sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak dengan baik adalah dengan penggunaan listrik untuk menggerakkan mesin kendaraan. Namun kendaraan tersebut juga masih mahal harganya sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat luas.

Untuk pemenuhan BBM tersebut masyarakat dapat membeli di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Kelangkaan bahan bakar minyak mungkin jarang terjadi di pulau Jawa namun kelangkaan ini sering terjadi diluar pulau Jawa. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan adanya kelangkaan dan pelanggaran penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) pada awal bulan Maret 2018 pada beberapa penyalur eksisting SPBU PT Pertamina (Persero) di Wilayah luar Jawa, Madura, dan Bali (Jamali).² Tentu jika kelangkaan terjadi maka akan berdampak pada berbagai sektor. Salah satunya adalah terganggunya mata pencaharian masyarakat sehingga menurunkan tingkat penghasilan.

Dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap BBM yang cukup tinggi dipengaruhi oleh banyaknya jumlah SPBU. Daerah-daerah yang tidak memiliki SPBU tentu akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan BBM dan

² <https://kumparan.com/@kumparanbisnis/ada-kelangkaan-premium-di-berbagai-daerah-bph-migas-tegur-pertamina> Diakses pada tanggal 14 Maret 2018, pukul 14.11 WIB

dibutuhkan usaha yang ekstra untuk mendapatkannya. Adanya masalah tersebut dimanfaatkan oleh beberapa kalangan masyarakat untuk dijadikan mata pencaharian. Melihat peluang ini beberapa masyarakat memilih menjadi penjual BBM eceran di pinggir-pinggir jalan. BBM tersebut diwadahi dengan botol kaca bertakaran satu liter. Tentu munculnya bisnis BBM eceran akan mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bahan bakarnya. Namun hal ini pun menjadi pro dan kontra di Indonesia. Meski dilarang hingga saat ini masih banyak pengusaha kecil BBM eceran yang tetap melakukan penjualan.

Untuk mendulang penghasilan yang lebih tinggi pada penjualan BBM eceran, muncul inovasi dan kreativitas sehingga para pengusaha BBM eceran dapat bersaing dengan yang lainnya. Pengusaha kecil BBM eceran membuat sebuah alat yang menyerupai mesin dispenser di SPBU Pertamina. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat dan membuat transaksi penjualan BBM eceran lebih praktis layaknya di SPBU milik Pertamina. Selain itu para pengusaha pemilik pom mini tersebut menamainya dengan pertamini yang merupakan plesetan dari PT. Pertamina. Ide kreatif ini muncul terlepas dari campur tangan pemerintah. Pom mini pertama kali marak pada tahun 2014. Pada kala itu mesin dispenser memiliki sebuah tabung ukur untuk mengukur jumlah liter ketika melakukan penjualan BBM. Penyimpanan BBM terletak didalam kotak dispenser, berbeda dengan SPBU Pertamina yang menampung bahan bakar minyak didalam tanah.

Bertambah tahun usaha Pom Mini juga semakin memiliki mesin yang semakin mirip dengan mesin di SPBU. Saat ini pom mini memiliki mesin dispenser digital layaknya di SPBU sehingga memudahkan pengukuran liter ketika

bertransaksi BBM. Ide kreatif masyarakat yang memunculkan pom mini dengan sebutan pertamini ini tidak memiliki izin yang jelas sehingga dapat disebut dengan ilegal. Keamanan dari pertamini sangat dipertanyakan, wadah penampungan minyak yang tidak ditanam dalam tanah akan rawan terjadinya kebakaran. Alat pemadam kebakaran yang merupakan peralatan keamanan yang wajib ada pada bisnis ini tidak ditemukan pada pom mini. Mesin digital milik pom mini juga diragukan dalam menghitung jumlah liter yang keluar dari dispenser karena bisa saja hal ini dapat diubah-ubah oleh pemilik usaha pom mini. Alat yang dimiliki para pengusaha pom mini pun belum standart atau belum SNI.

Salah satu daerah yang memiliki jumlah pom mini yang banyak dan berkembang pesat berada di Kabupaten Blitar. Para pengusaha pom mini ini berada dibawah pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. Sebenarnya pihak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar ingin memajukan dan mengembangkan usaha kecil milik masyarakat dan pom mini ini merupakan salah satu kegiatan usaha kecil masyarakat namun usaha pom mini ini belum mengantongi perizinan resmi dari pemerintah. Pihak pemerintah daerah hingga sampai saat ini belum melakukan tindakan langsung kepada para pengusaha pom mini. Sampai detik ini kegiatan yang dilakukan masih berupa pengawasan.

Tabel 1.1

Daftar SPBU di Kabupaten Blitar

No.	Kode SPBU	Alamat
1.	SPBU 54.661.01	Ds. Begelanan, Kecamatan Srengat
2.	SPBU 54.661.02	Ds. Beru, Kecamatan Wlingi
3.	SPBU 54.661.05	Ds. Pagerwojo, Kecamatan Kesamben
4.	SPBU 54.661.09	Kecamatan Kanigoro
5.	SPBU 54.661.10	Ds. Jimbe, Kecamatan Kademangan

6.	SPBU 54.661.11	Ds. Tangkil, Kecamatan Wlingi
7.	SPBU 54.661.12	Ds. Bence, Kecamatan Garum
8.	SPBU 54.661.13	Ds. Slemanan Kecamatan Udanawu
9.	SPBU 54.661.14	Ds. Dawuhan, Kecamatan Kademangan
10.	SPBU 54.661.15	Ds. Siraman, Kecamatan Kesamben
11.	SPBU 54.661.16	Kecamatan Sutojayan
12.	SPBU 54.661.17	Ds. Soso, Kecamatan Gandusari
13.	SPBU 54.661.18	Ds. Sidorejo, Kecamatan Ponggok
14.	SPBU 54.661.19	Kecamatan Selorejo
15.	SPBU 54.661.20	Ds. Bendo, Kecamatan Ponggok
16.	SPBU 54.661.21	Kecamatan Binangun
17.	SPBU 54.661.22	Ds. Pikatan, Kecamatan Wonodadi
18.	SPBU 54.661.23	Ds. Pakisrejo, Kecamatan Srengat
19.	SPBU 54.661.24	Kecamatan Nglegok
20.	SPBU 54.661.26	Ds. Bence, Kecamatan Garum
21.	SPBU 54.661.27	Kecamatan Srengat
22.	SPBU 54.661.29	Ds. Bacem, Kecamatan Ponggok
23.	SPBU 54.661.30	Kecamatan Selopuro
24.	SPBU 54.661.31	Jl. Raya Talun, Kecamatan Talun
25.	SPBU 54.661.32	Ds. Sambong, Kecamatan Kanigoro
26.	SPBU 54.661.33	Ds. Togagan, Kecamatan Srengat
27.	SPBU 54.661.35	Ds. Kedungbunder, Kecamatan Sutojayan
28.	SPBU 54.661.36	Ds. Bangsri, Kecamatan Nglegok

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2018

Kabupaten Blitar memiliki 22 kecamatan dan tidak semua kecamatan memiliki atau terdapat SPBU. Ada sebanyak delapan kecamatan yang tidak terdapat SPBU. Padahal luas satu kecamatan di Kabupaten Blitar melebihi luas Kota Blitar sendiri dan memiliki kurang lebih delapan SPBU. Dapat dilihat dari tabel tersebut ada sebanyak 28 SPBU di Kabupaten Blitar, jumlah yang tergolong banyak namun belum merata di setiap kecamatan. Hal tersebut yang menjadi salah satu faktor maraknya pengusaha pom mini di Kabupaten Blitar. Selain itu, adanya pedagang BBM eceran dalam bentuk pom mini ini sangat membantu dalam mendistribusikan BBM ditempat-tempat yang jauh dari jangkauan SPBU. Sekaligus membantu pemerataan dan memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak masyarakat.

Kegiatan usaha pom mini ini sebenarnya bertentangan dengan berbagai macam peraturan sehingga menimbulkan permasalahan. Perlu diketahui sebelumnya bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi dikelompokkan menjadi dua, yaitu kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan penjualan bahan bakar minyak ini termasuk pada kegiatan hilir. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 23 ayat 1 menyatakan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.³ Hal tersebut juga tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pasal 13 ayat 1 bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri.⁴

Dari kedua pasal tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan usaha penjualan bahan bakar minyak harus berbentuk badan usaha dan memiliki izin dari pemerintah ataupun menteri. Sedangkan para pengusaha BBM pertamini kebanyakan merupakan milik perorangan saja dan tidak memiliki izin usaha yang resmi. Tentunya hal ini sangat bertentangan dan dapat dikenakan beberapa sanksi hukum. Para pengusaha pom mini dapat dijerat dengan sanksi hukuman penjara maksimal selama lima tahun jika tetap menjalankan usaha tersebut.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Permasalahan berikutnya adalah mesin dispenser yang dimiliki pom mini sudah bertambah canggih daripada sebelumnya dan sangat mirip dengan yang ada di SPBU Pertamina yaitu menggunakan sistem digital pada alat ukurnya. Hal tersebut merupakan inovasi yang bagus tetapi tidak adanya kejelasan dalam penggunaan alat ukur digital tersebut membuatnya diragukan keaslian takarannya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal pasal 25 huruf b menyatakan bahwa dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku.⁵ Menurut undang-undang tersebut segala macam alat ukur haruslah memiliki tanda tera sah yang artinya alat ukur tersebut dapat digunakan dengan semestinya atau layak untuk digunakan. Meski alat ukur pom mini sudah digital, alat ukur tersebut masih bisa diubah-ubah oleh pemiliknya sehingga rawan terjadinya tindakan kecurangan.

Hal ini juga ditekankan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang Perlengkapannya (UTTP). Pada pasal 2 huruf b dan c bahwa UTTP yang digunakan untuk usaha, menyerahkan dan menerima barang merupakan UTTP wajib tera dan tera ulang.⁶ Dan tentunya

⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang Perlengkapannya

terdapat sanksi hukum yang mengatur jika pihak pengusaha pom mini tetap melakukan penjualan dengan alat ukur digital milik mereka.

Permasalahan adanya pengusaha penjualan BBM dengan pom mini ini sebenarnya hampir terselesaikan dengan dibuatnya peraturan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. BPH Migas mencoba atau ingin memberikan kesempatan kepada para penjual BBM dengan pom mini agar usaha mereka dapat dikerjakan dengan legal. Jadi masyarakat tidak perlu membuat sebuah badan usaha untuk melakukan penjualan BBM. Daerah yang belum memiliki penyalur BBM dapat menunjuk sub penyalur yang merupakan perwakilan atau perwakilan dari masyarakat setempat. Sub penyalur tersebut ditunjuk dan harus mendapatkan perizinan dari pemerintah daerah setempat. Jadi tidak semua masyarakat dapat melakukan penjualan bahan bakar minyak. Hal ini diatur dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur.

Untuk menjadi sub penyalur tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Namun persyaratan itu sendiri yang memberatkan dan membuat para pengusaha pom mini enggan untuk memenuhinya sehingga tetap menjadi ilegal. Persyaratan ini telah tertulis jelas pada Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur, pasal 6, yaitu:⁷

⁷ Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur

- a. Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa usaha dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa
- b. Lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standar keselamatan kerja dan lingkungan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Memiliki izin lokasi dari pemerintah daerah setempat untuk dibangun fasilitas Sub Penyalur
- g. Lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 km dari lokasi penyalur berupa APMS terdekat, atau 10 km dari penyalur berupa SPBU terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan
- h. Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat

Persyaratan tersebut sulit untuk dipenuhi oleh kebanyakan pemilik pom mini yang mayoritas adalah pengusaha kecil. Mungkin syarat tersebut lebih cocok kepada pengusaha menengah keatas. Karena dari sekian jumlah persyaratan tersebut harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Selain itu, meski tidak harus berbentuk badan usaha tapi dari persyaratan tersebut kegiatan usaha harus dilakukan oleh sekelompok orang tidak bisa hanya perorangan saja sehingga dengan aturan semacam ini justru menambah kontra kepada pengusaha kecil bahan bakar minyak dan permasalahan legalitas pom mini dipertanyakan kembali.

Jumlah pengusaha pom mini yang beredar di Kabupaten Blitar sebanyak 150 pengusaha.⁸ Dari jumlah tersebut tidak ada pengusaha pom mini yang mengantongi izin usaha. Pihak pemerintah daerah sampai saat ini belum diketahui tindakan semacam apa yang telah dilakukan. Setiap tindakan pemerintah daerah tentu akan mempengaruhi masalah maraknya ilegalitas usaha pom mini. Jumlah pengusaha pom mini yang tetap menjamur menjadi sebuah pertanyaan apa yang dilakukan pihak pemerintah hingga sekarang. Hingga saat ini pihak yang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan perihal pom mini masih ditangan pemerintah pusat. BPH Migas yang juga memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan berada di tingkat pusat dan tidak memiliki perwakilan di daerah sehingga turut menyulitkan proses pengawasan.

Rentetan permasalahan terkait pom mini terutama permasalahan pada perizinan usahanya yang membuat bisnis pom mini ilegal, ternyata tidak menyurutkan keinginan masyarakat untuk tetap menjalankan usaha atau bisnis pom mini. Pihak pemerintah daerah juga belum diketahui pasti tindakan apa yang telah diambil terhadap permasalahan ilegalitas usaha pom mini. Perlu adanya analisis terhadap alasan dan faktor-faktor yang mempengaruhi rasionalitas pemerintah Kabupaten Blitar dalam memberikan tindakan terhadap ilegalitas usaha pom mini yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Blitar.

⁸ Wawancara dengan Bapak Purwanto, S.Sos Selaku Pelaksana teknis Kegiatan Operasional dan Pengembangan UPT Kemetrolagian pada tanggal 5 Maret 2018

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana rasionalitas tindakan Pemerintah Kabupaten Blitar terhadap ilegalitas usaha pom mini di Kabupaten Blitar ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, adapun tujuan penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Untuk menganalisis rasionalitas tindakan Pemerintah Kabupaten Blitar terhadap ilegalitas usaha pom mini di Kabupaten Blitar

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan agar dapat memberikan dua manfaat yaitu baik secara akademis maupun praktis. Manfaat tersebut, yaitu:

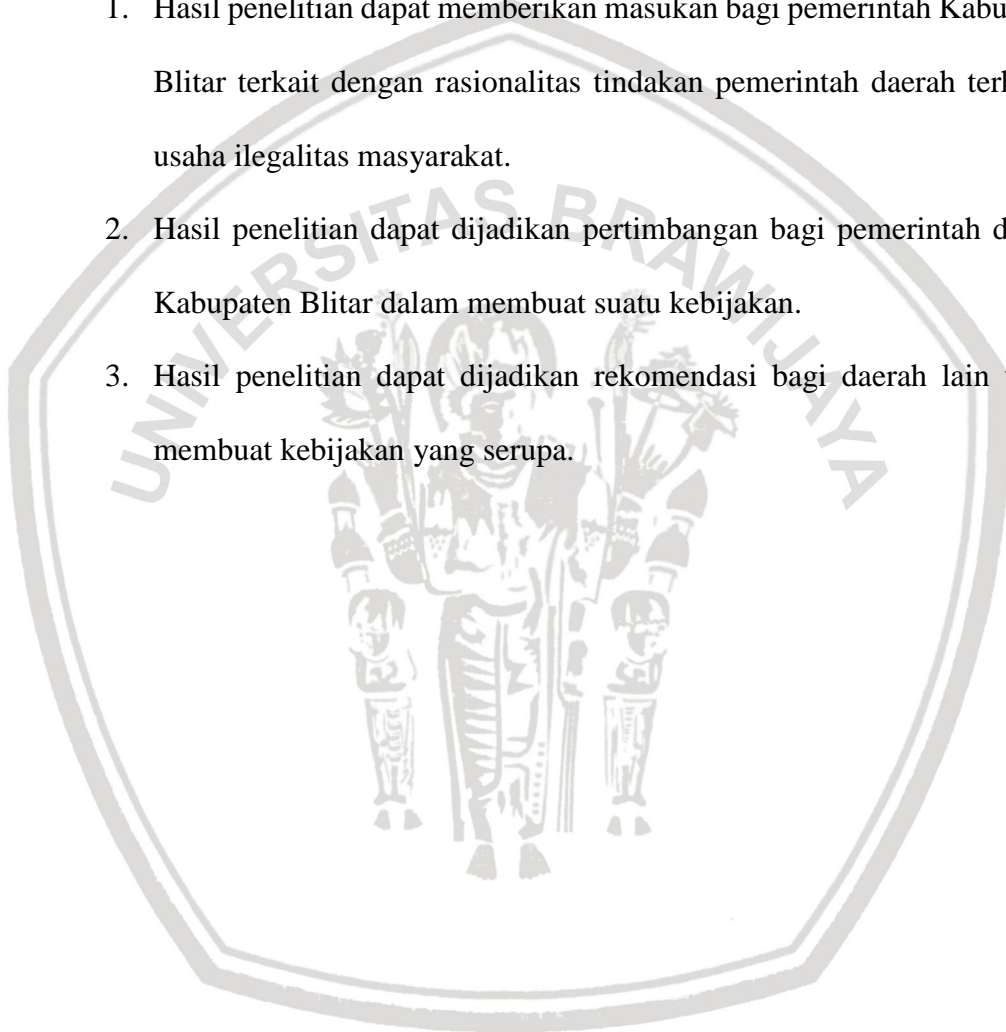
1.4.1. Manfaat Akademis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran terkait dengan analisis rasionalitas tindakan Pemerintah Kabupaten Blitar terhadap ilegalitas usaha pom mini di Kabupaten Blitar dalam membuat kebijakan di Kabupaten Blitar.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber wawasan keilmuan baru yang bermanfaat bagi akademisi, pemerintah maupun masyarakat luas.

3. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan ataupun referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya yang meneliti tentang rasionalitas tindakan pemerintah daerah terhadap usaha ilegalitas masyarakat.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Blitar terkait dengan rasionalitas tindakan pemerintah daerah terhadap usaha ilegalitas masyarakat.
2. Hasil penelitian dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Blitar dalam membuat suatu kebijakan.
3. Hasil penelitian dapat dijadikan rekomendasi bagi daerah lain untuk membuat kebijakan yang serupa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tiga hal pokok yang nantinya membantu penulis dalam melakukan penelitian kedepannya. Pertama, penelitian terdahulu sebagai acuan penulis dalam memaparkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan penelitian penulis. Selain itu, penelitian terdahulu sebagai dasar pembeda penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kedua, kerangka konseptual berisi teori yang digunakan penulis untuk menganalisis penelitian terkait rasionalitas tindakan pemerintah Kabupaten Blitar terhadap usaha ilegalitas masyarakat. Ketiga, alur pikir penelitian yang menggambarkan pemikiran penulis atau kerangka acuan terkait penelitian yang dilakukan.

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, penulis menjelaskan mengenai hasil penelitian terdahulu dengan pembahasan yang serupa yaitu tentang rasionalitas pengusaha kecil dalam pemilihan objek usaha. Berbagai hasil penelitian tersebut memiliki fokus pembahasan yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan penulis lebih mengarah pada rasionalitas tindakan pemerintah daerah terhadap usaha ilegalitas masyarakat sedangkan beberapa hasil dari penelitian terdahulu memfokuskan pada bidang usaha yang lain. Selain itu penulis juga menemukan hasil penelitian yang memaparkan ilegalitas dari usaha pom mini tersebut. Berikut merupakan hasil

penelitian terdahulu yang dapat menjadi rujukan penulis dalam melakukan penelitian :

Pertama, hasil penelitian skripsi Dian Rinihastuti dengan judul penelitian “Pemilihan Pekerjaan di Sektor Industri Kecil dan Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Pemuda Di Desa Sidoleren Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus tunggal. Tujuan dari penelitian tersebut adalah mendeskripsikan pandangan pemuda mengenai pekerjaan di sektor industri, mendeskripsikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi para pemuda Desa Sidoleren memilih pekerjaan di sektor industri dan mendeskripsikan alasan rasional para pemuda Desa Sidoleren lebih memilih pekerjaan industri kecil dan rumah tangga daripada sektor lain. Hasil dari penelitian tersebut adalah pemaparan pandangan tentang pekerjaan di sektor industri itu enak, santai dan mendapatkan gaji tiap bulan dengan jumlah yang lebih besar. Alasan rasional pemuda Desa Sidoleren memilih pekerjaan tersebut adalah alasan ekonomi dan upah, tingkat pendidikan, keinginan belajar mandiri, alasan sosial dan alasan gaya hidup dan pergaulan kaum industri yang lebih modern.

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian tersebut adalah penulis berfokus pada pengusaha kecil di Kabupaten Blitar dalam pemilihan objek usaha pom mini. Sedangkan penelitian tersebut berfokus pada pemuda di Desa Sidoleren Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dalam pemilihan pekerjaan di sektor industri kecil dan rumah tangga. Perbedaan yang mendasar lainnya adalah teori yang digunakan penulis adalah teori pilihan rasional sedangkan dalam penelitian tersebut menggunakan teori motivasi kerja dan teori pilihan rasional.

Kedua, hasil penelitian skripsi oleh Muhammad Khaafidh dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Tenaga Kerja Untuk Bekerja di Kegiatan Pertanian (Studi Kasus Di Kabupaten Rembang)”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tenaga kerja untuk bekerja pada bidang pertanian di Kabupaten Rembang. Metode penelitian yang digunakan regresi logistik biner (*binary logistic regression*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil nilai McFadden R-squared sebesar 0,760470 dan nilai LR stat sebesar 90,18469.⁹ Dari nilai tersebut dapat dikatakan variabel kepemilikan lahan, pengalaman bertani, pendidikan, usia dan pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan tenaga kerja dalam memilih bekerja di kegiatan pertanian di Kabupaten Rembang.

Ketiga, hasil penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah dengan judul “Analisis faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tenaga kerja Memilih Sektor Informal Sebagai Mata Pencarian (Studi Kasus Pada Pasar Penampungan Sementara Merjosari Malang)”. Jurnal ilmiah ini ditulis oleh Ikhwan Nur Antyanto. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang paling mempengaruhi keputusan tenaga kerja untuk memilih sektor informal sebagai mata pencariannya di Pasar Penampungan Sementara Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif *explanatory* dengan metode analisis regresi logistik. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel usia dan pendidikan

⁹ Muhammad Khaafidh, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Tenaga Kerja Untuk Bekerja di Kegiatan Pertanian*, Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang

secara bersama-sama berpengaruh signifikan sedangkan pendapatan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan tenaga kerja memilih sektor informal sebagai mata pencaharian.¹⁰

Keempat, hasil penelitian skripsi dengan judul “Rasionalitas Generasi Muda Dalam Berwirausaha (Studi Kasus Pada Mahasiswa Unila Yang Pernah Mengambil Mata Kuliah Kewirausahaan)” . Penelitian skripsi ini ditulis oleh Septini Diandini Pandjaitan. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan rasionalitas generasi muda dalam berwirausaha. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasionalitas generasi muda dalam berwirausaha adalah untuk mencari alternative dan solusi terbaik dalam memecahkan masalah secara mandiri, mendapat dorongan dari teman sepergaulan, pendidikan dan pengalaman bisnis kecil-kecilan, dan mendapatkan keuntungan yang dijadikan alternatif dalam bertahan hidup.

Kelima, hasil penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Penjualan BBM Dengan Nama Pertamina Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi”. Penelitian skripsi ini ditulis oleh Muhammad Hendri. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Tujuan dari penelitian tersebut menerangkan penegakan hukum pidana apa terhadap penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan nama Pertamina dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang

¹⁰ Ikhwana Nur Antyanto, 2014, *Analisis faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tenaga kerja Memilih Sektor Informal Sebagai Mata Pencaharian (Studi Kasus Pada Pasar Penampungan Sementara Merjosari Malang)*, Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang

Minyak dan Gas Bumi, menjelaskan alasan tidak ditindaknya kegiatan usaha hilir pengecer BBM pertamini dan solusi pemecahan masalah lebih tingginya harga BBM yang ditawarkan oleh pengecer BBM pertamini. Hasil dari penelitian menunjukan tindak pidana terhadap penjualan BBM dengan alat pertamini belum dapat dilakukan karena belum adanya aturan mengenai pendistribusian bbm terhadap pengecer bbm dengan nama pertamini, pengawasan terhadap pengecer penjualan BBM dengan nama pertamini belum dapat terlaksana dengan baik karena belum adanya koordinasi yang dilakukan oleh BPH Migas dengan pelaku kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi dalam hal ini adalah pemerintah daerah dan SPBU dan adanya pengecer BBM dengan nama pertamini tersebut dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak masyarakat.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Metode dan Teori	Deskripsi Penelitian	Perbedaan
1.	Skripsi Dian Rinihastuti (2010) dengan judul Pemilihan Pekerjaan di Sektor Industri Kecil dan Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Pemuda Di Desa Sidoleren Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo)	Metode penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus tunggal. Teori motivasi kerja dan teori pilihan rasional	Penelitian tersebut mendeskripsikan pandangan pemuda mengenai pekerjaan disektor industri, mendeskripsikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi para pemuda Desa Sidoleren memilih pekerjaan di sektor industri dan mendeskripsikan alasan rasional para pemuda Desa Sidoleren lebih memilih pekerjaan industri kecil dan	Fokus yang diangkat berbeda, dan lokasinya pun berbeda. Penulis sebelumnya menggunakan teori motivasi kerja dan teori pilihan rasional sedangkan penulis sekarang hanya menggunakan teori pilihan rasional

			rumah tangga daripada sektor lain. Hasilnya, Alasan rasional pemuda Desa Sidoleren memilih pekerjaan tersebut adalah alasan ekonomi dan upah, tingkat pendidikan, keinginan belajar mandiri, alasan sosial dan alasan gaya hidup dan pergaulan kaum industri yang lebih modern	
2.	Skripsi oleh Muhammad Khaafidh (2013) dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Tenaga Kerja Untuk Berkerja di Kegiatan Pertanian (Studi Kasus Di Kabupaten Rembang)	Metode penelitian yang digunakan regresi logistik biner (<i>binary logistic regression</i>). Teori keputusan dan teori pilihan rasional	Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tenaga kerja untuk bekerja pada bidang pertanian di Kabupaten Rembang. Hasil dari penelitian ini menunjukan variabel kepemilikan lahan, pengalaman bertani, pendidikan, usia dan pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan tenaga kerja dalam memilih bekerja di kegiatan pertanian di Kabupaten rembang	Fokus yang diangkat berbeda, dan lokasinya pun berbeda. Penulis sebelumnya menggunakan metode penelitian regresi logistic biner sedangkan penulis sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif deskripsi
3.	Jurnal ilmiah oleh Ikhwan Nur (2014) Antyanto dengan judul Analisis faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Memilih Sektor Informal Sebagai Mata Pencarian (Studi Kasus Pada Pasar	Metode penelitian kuantitatif <i>explanatory</i> . Teori keputusan dan teori pilihan rasional.	Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang paling mempengaruhi keputusan tenaga kerja untuk memilih sektor informal sebagai mata pencahariannya di Pasar Penampungan Sementara Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota	Fokus yang diangkat berbeda, dan lokasinya pun berbeda. Penulis sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif <i>explanatory</i> sedangkan

	Penampungan Sementara Merjosari Malang).		Malang. Hasil dari penelitian tersebut menunjukan variabel usia dan pendidikan secara bersama-sama berpengaruh signifikan sedangkan pendapatan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan tenaga kerja memilih sektor informal sebagai mata pencaharian	penulis sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif
4.	Skripsi oleh Septini Diandini Pandjaitan (2016) dengan judul Rasionalitas Generasi Muda Dalam Berwirausaha (Studi Kasus pada mahasiswa Unila Yang Pernah Mengambil Mata Kuliah Kewirausahaan).	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Tinjauan mengenai rasionalitas, berwirausaha dan rasionalitas berwirausaha	Penelitian tersebut membahas mengenai rasionalitas generasi muda dalam berwirausaha. Hasil penelitian menunjukan bahwa rasionalitas generasi muda dalam berwirausaha adalah untuk mencari alternatif dan solusi terbaik dalam memecahkan masalah secara mandiri, mendapat dorongan dari teman sepergaulan, pendidikan dan pengalaman bisnis kecil-kecilan, dan mendapatkan keuntungan yang dijadikan alternatif dalam bertahan hidup.	Fokus yang diangkat berbeda, dan lokasinya pun berbeda.
5.	Skripsi oleh Muhammad Hendri (2016) dengan judul Tinjauan Yuridis Penjualan BBM Dengan Nama Pertamina Dihubungkan	Metode penelitian yang digunakan pendekatan yuridis normatif. Kerangka teori dengan	Penelitian tersebut menerangkan penegakan hukum pidana apa terhadap penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan nama Pertamina dihubungkan dengan Undang-	Penulis sebelumnya fokus kepada tinjauan yuridis penjualan BBM Pertamina sedangkan penulis sekarang berfokus pada

	Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.	tinjauan umum tentang migas, tindak pidana dan penerapan, dan penegakan hukum pidana terhadap Pertamina.	Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, menjelaskan alasan tidak ditindaknya kegiatan usaha hilir pengecer BBM Pertamina dan solusi pemecahan masalah lebih tingginya harga BBM yang ditawarkan oleh pengecer BBM Pertamina	rasionalitas pengusaha kecil dalam memilih usaha pom mini atau Pertamina
--	---	--	---	--

Sumber : Data Hasil Olahan Penulis, 2018.

Hasil pengamatan penulis dari beberapa penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu diatas. Penulis dalam hal ini lebih berfokus pada analisis rasionalitas tindakan pemerintah daerah terhadap ilegalitas usaha pom mini oleh masyarakat di Kabupaten Blitar. Dari penelitian terdahulu diatas memang memiliki pokok pembahasan yang sama dengan penulis, yaitu membahas mengenai rasionalitas dalam melakukan tindakan namun memiliki subjek rasionalitas yang berbeda dan objek yang berbeda juga dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Selain itu, belum adanya penelitian yang lebih berfokus pada analisis rasionalitas tindakan pemerintah daerah terhadap ilegalitas usaha pom mini di Kabupaten Blitar. Penelitian sebelumnya yang terkait dengan pom mini atau Pertamina lebih membahas mengenai penegakan pidana terhadap penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer BBM dengan pom mini yang menggunakan nama Pertamina.

2.2 Kerangka Teoritik

Pada sub bab ini menjelaskan mengenai teori yang digunakan oleh penulis sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penulis menggunakan teori pilihan rasional dalam penelitian ini. Teori pilihan rasional dipilih untuk mengkerangkai fokus penelitian yaitu menganalisis rasionalitas tindakan pemerintah daerah terhadap ilegalitas usaha pom mini oleh masyarakat di Kabupaten Blitar.

2.2.1. Teori Pilihan Rasional

Pilihan rasional merupakan sebuah teori yang sering digunakan pada beberapa bidang keilmuan, seperti ekonomi, sosiologi, politik dan sebagainya. Teori ini menjelaskan mengenai pengambilan keputusan terhadap beberapa pilihan-pilihan alternatif, dimana dari beberapa pilihan tersebut terdapat pilihan yang paling menguntungkan sesuai dengan rasionalitas pengambil keputusan. Teori tersebut memiliki versi yang berbeda-beda namun penganut teori ini sebagian besar mengacukan pembahasannya pada sebuah kata-kata kunci. Kata kunci tersebut adalah asumsi intensionalitas (maksud), asumsi rasionalitas, perbedaan informasi yang sempurna dan tidak sempurna, antara resiko dan ketidakpastian dan perbedaan antara tindakan strategis dan saling ketergantungan (interdependen).¹¹ Dari kata kunci tersebut dapat dijabarkan dalam empat poin.

Pertama, individu dalam melakukan sebuah tindakan selalu memiliki intensionalitas atau sebuah maksud tujuan. Hal tersebut berkenaan dengan penjelasan dari pilihan rasional yang merupakan bagian dari penjelasan maksud

¹¹ I.B Wirawan, Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial), Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 210

tujuan (*intentional explanations*). *Intentional explanations* tidak hanya menyatakan bahwa setiap individu bertindak secara intensional (dengan maksud tertentu) akan tetapi dengan *intentional explanations* juga mempertimbangkan tentang praktik-praktik sosial seperti keyakinan/kepercayaan masyarakat serta keinginan-keinginan dari para individu yang terlibat.¹²

Kedua, Rasionalitas menjadi hal dasar bagi individu untuk memutuskan berbagai alternatif pilihan. Rasionalitas disini diartikan bahwa ketika bertindak dan beraksi, seorang individu memiliki rencana yang koheren, dan mencoba untuk memaksimalkan kepuasan dirinya sesuai dengan preferensi yang dia miliki, serta sedapat mungkin meminimalkan biaya yang dibutuhkan.¹³ Rasionalitas dapat digunakan sebagai cara untuk mengatur dan mengurutkan preferensi dari berbagai pilihan yang ada sehingga rasionalitas membantu individu untuk memilih pilihan dengan tingkat preferensi yang lebih tinggi.

Ketiga, ketidakpastian dengan risiko memiliki sebuah perbedaan. Selain itu, informasi yang sempurna tidak mungkin didapatkan oleh individu-individu dalam menjalani sebuah kehidupan. Ada perbedaan di dalam informasi yang sempurna antara ketidakpastian dengan risiko, suatu perbedaan yang pertama kali dikenalkan oleh J.M. Keynes dan F. Knight dan RCT cenderung memandang pilihan dalam ketidakpastian sebagaimana pilihan dalam risiko.¹⁴ Individu yang dihadapkan pada pilihan yang memiliki risiko lebih dapat mencapai keberhasilan dengan

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hlm. 211

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 212

kemungkinan yang ada daripada dihadapkan pada pilihan dengan ketidakpastian. Mengingat setiap tindakan dan perilaku yang dibuat oleh manusia selalu memiliki sebuah konsekuensi.

Keempat, tindakan strategis dan saling ketergantungan merupakan sebuah cara bagi pembuat keputusan dalam memilih alternatif pilihan. Individu yang berkelompok cenderung menggunakan cara saling ketergantungan, dimana dalam memutuskan pilihan seorang individu membutuhkan orang lain untuk melancarkan pilihannya demi mencapai keberhasilan. Hal tersebut tentu berbeda dengan individu yang dihadapkan pada pilihan-pilihan yang harus dia putuskan sendiri tanpa bergantung dengan orang lain. Suboptimality dan counterfinality adalah contoh dari pilihan strategis, dimana seseorang sebelum menentukan pilihan harus mempertimbangkan pilihan-pilihan yang dibuat oleh orang lain.¹⁵

Pilihan rasional dikaitkan dengan tindakan-tindakan yang rasional. Namun belum ada ukuran yang pasti apakah tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut dapat dikatakan rasional atau tidak. Hal yang dianggap rasional belum tentu dianggap rasional juga oleh orang lain sehingga setiap individu memiliki berbagai macam alasan untuk menguatkan rasionalitas mereka. Teori pilihan rasional juga dikaitkan dengan tindakan ekonomi. Karena sebagian besar individu menetapkan pilihan untuk memenuhi kepuasaannya dalam sebuah keuntungan dalam bentuk ekonomi. Dalam hal ini, konsep kegunaan (*utility*) tampil menonjol dalam ilmu ekonomi dan merupakan cara umum untuk meringkaskan pilihan-pilihan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 213.

keuntungan (manfaat) yang diperoleh pembuat keputusan dan kemudian konsep utilitas sering muncul dalam literatur pilihan rasional dalam ilmu politik.¹⁶ Kaitannya dengan pilihan rasional menurut Olson dalam Haryanto, pilihan tindakan seorang individu dapat dikatakan rasional jika dia telah berusaha meminimalisasikan biaya dan memaksimalkan ganjaran.¹⁷ Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan, individu yang telah melakukan banyak pengorbanan tetapi memiliki hasil yang sedikit adalah tindakan yang tidak rasional.

Seorang individu harus mengatur perilaku dan tindakannya agar tetap stabil dalam pilihan yang diputuskan demi memaksimalkan hasil yang diperoleh di masa depan. Pilihan rasional tidak akan berjalan jika individu tidak menyesuaikan tindakan dengan pilihannya. Karena hal ini akan berpengaruh pada tujuan individu tersebut. Dalam hal ini rasional berarti:¹⁸

- Aktor melakukan perhitungan dari pemanfaatan atau preferensi dalam pemilihan suatu bentuk tindakan.
- Aktor juga menghitung biaya bagi setiap jalur perilaku.
- Aktor berusaha memaksimalkan pemanfaatan untuk mencapai pilihan tertentu.

Salah satu pengembang teori pilihan rasional adalah James S. Coleman. Teori ini ia kembangkan dengan melihat aktor rasional dari ilmu ekonomi. Hal tersebut dikarenakan aktor ekonomi akan lebih memilih tindakan yang nantinya akan memaksimalkan keinginan dan kebutuhannya. Menurut Coleman dalam Ritzer, teori pilihan rasional tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa tindakan

¹⁶ John T. Ishiyama dan Marijke Breuning, 2013, *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Kedua Puluh Satu: Sebuah Referensi Panduan Tematis Jilid Satu*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 59.

¹⁷ Sindung Haryanto, 2016, *Sosiologi ekonomi*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, hlm. 109.

¹⁸ Damsar, 2009, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 153

seseorang mengarah kepada suatu tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi).¹⁹

Teori ini memandang bahwa individu-individu akan membentuk sistem sosial. Hal tersebut terjadi karena individu-individu memiliki tindakan dan pilihannya sendiri serta saling berinteraksi dengan yang lainnya. Interaksi antar individu membuat tindakan dan pilihan yang dibuat satu individu akan berdampak juga dengan individu yang lain dan mempengaruhi tindakan dan pilihan yang akan dia lakukan sehingga rentetan dari tindakan-tindakan dan pilihan individu tersebut akan membentuk sebuah fenomena yang lebih besar atau dapat dikatakan sebuah sistem sosial. Fenomena tersebut bahkan tidak dimaksudkan atau tidak dapat diprediksikan oleh individu.²⁰ Pembentukan sistem sosial dari tindakan individu-individu dapat disebut dengan mikro-makro dalam teori milik Coleman.

Sebagai contoh dari proses mikro-makro tersebut dapat dilihat dengan penelitian ini. Masyarakat memilih untuk melakukan usaha pom mini. Melakukan usaha pom mini ternyata dirasa masyarakat telah menghasilkan keuntungan yang lumayan sehingga diikuti oleh masyarakat Kabupaten Blitar lainnya. Pemerintah daerah belum melakukan tindakan tegas terhadap tindakan masyarakat yang memiliki usaha pom mini. Tindakan pemerintah tentu akan mempengaruhi keberadaan usaha pom mini tersebut. Tentu tidak hanya tindakan pengusaha pom mini dan pemerintah saja, tindakan masyarakat lainnya seperti konsumen BBM,

¹⁹ George Ritzer, 2014, *Teori Sosiologi Modern Edisi Ketujuh*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.369

²⁰ James S. Coleman, 2013, *Dasar-Dasar Teori Sosial Foundations of Social Theory*, Nusa Media, Bandung, hlm. 7

media dan lembaga swadaya masyarakat turut ambil bagian dalam keberlangsungan usaha pom mini. Rentetan tindakan tersebut mengakibatkan fenomena yang lebih besar yaitu maraknya ilegalitas usaha pom mini di Kabupaten Blitar. Teori pilihan rasional milik Coleman memiliki dua unsur penting didalamnya yaitu aktor dan sumber daya.

Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor.²¹ Sumber daya yang dimiliki dan dikontrol oleh seseorang akan menarik perhatian pihak yang lain sehingga terbentuk tindakan saling membutuhkan diantara keduanya. Sumber daya yang dimiliki individu bisa dalam bentuk apa saja, seperti uang, tanah, keterampilan, kewenangan dan sebagainya. Sumber daya yang aktor miliki sebagai dasar untuknya membuat keputusan terhadap pilihan-pilihan yang ada. Seorang individu dapat melakukan perankingan terhadap alternatif pilihan berdasarkan tingkat preferensi atau prioritas. Melihat analisis rasionalitas tindakan Pemerintah Kabupaten Blitar terhadap ilegalitas usaha pom mini oleh masyarakat di Kabupaten Blitar, aktor disini adalah Pemerintah Kabupaten Blitar dan pemilik usaha pom mini.

Sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah adalah berupa undang-undang terkait dengan pom mini. Sumber daya yang lain dapat berupa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pemilik usaha pom mini menganggap rasional kegiatan usaha miliknya dengan menghadapkan pada kondisi ekonomi dan untuk bertahan hidup didalam masyarakat. Namun banyak alasan bagi pemerintah

²¹ George Ritzer, *Op. Cit.*, hlm 369

untuk mengatakan usaha tersebut ilegal mulai dari peralatan yang tidak standar hingga segi keamanan yang kurang memadai. Meski pemerintah dapat memberikan alasan bahwa usaha tersebut ilegal hingga saat ini pemerintah hanya melakukan pengawasan saja dan tidak melakukan penindakan seperti menutup usaha pom mini tersebut ataupun berupa dukungan dengan upaya pelegalan sehingga perlu dilakukan sebuah penelitian dalam menganalisis rasionalitas tindakan Pemerintah Kabupaten Blitar terhadap ilegalitas usaha pom mini dengan nama pertamini ini oleh masyarakat di Kabupaten Blitar.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah bagian yang menjelaskan alur dari penulisan penelitian. Tujuan yang dimiliki dari kerangka pemikiran untuk memudahkan pembaca dalam menganalisis dan mengidentifikasi maksud dari penelitian. Penelitian ini membahas mengenai analisis rasionalitas rasionalitas tindakan Pemerintah Kabupaten Blitar terhadap ilegalitas usaha pom mini oleh masyarakat di Kabupaten Blitar. Berdasarkan penjelasan dari penulis terkait latar belakang, fokus penelitian, sampai dengan teori dan konsep yang digunakan. Berikut adalah kerangka pemikiran yang dibuat oleh penulis :

Bagan 2.1

Alur Pikir Penelitian

- UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
- PP RI No. 30 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas PP RI No. 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
- UU No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang Perlengkapannya
- Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur.

Ilegalitas Usaha Pom Mini

Teori Pilihan Rasional
James S. Coleman

Aktor

Disperindag Kab. Blitar
DPMPTSP Kab. Blitar
Dinas Satpol PP

Sumber Daya

Kewenangan
Pengetahuan
Peraturan/ UU
Uang
Relasi

Praktik Rasionalitas

1. Disperindag Kab. Blitar melakukan pendataan terhadap jumlah pom mini dari distributor pom mini
2. DPMPTSP kab. Blitar tidak melakukan proses pelayanan apapun terkait perizinan dengan usaha pom mini yang ilegal
3. Dinas Satpol PP Kab. Blitar melakukan langkah persuasif terhadap beberapa pengusaha pom mini

Hasil:

Pemerintah Kabupaten Blitar belum melakukan tindakan yang maksimal terhadap permasalahan usaha pom mini. Kewenangan metrologi legal merupakan hal baru bagi Pemerintah Kabupaten Blitar sehingga memunculkan kesalahpahaman tindakan pengawasan terhadap pom mini. selain itu, Pemerintah Kabupaten Blitar ingin memajukan usaha perekonomian masyarakat sehingga menjadi pertimbangan pemerintah ketika melakukan penindakan terhadap usaha pom mini

Sumber : Diolah Oleh Penulis, 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Didalamnya menjelaskan jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini dapat dilakukan untuk menjelaskan kebenaran pada fenomena yang rumit secara detail yang mungkin sulit dijelaskan pada metode kuantitatif sehingga dapat memberikan pemaknaan yang mendalam. Menurut Jane Richie dalam Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.²² Sedangkan menurut Creswell dalam Rulam Ahmadi, penelitian kualitatif merupakan suatu proses inkuiri pemahaman berdasarkan pada tradisi-tradisi metodologis yang jelas tentang inkuisi yang mengeksplorasi masalah sosial atau manusia.²³ Dalam penelitian yang dilakukan penulis meneliti dan menganalisis rasionalitas tindakan Pemerintah Kabupaten Blitar terhadap ilegalitas usaha pom mini di Kabupaten Blitar. Maka dari itu penelitian ini memiliki kompleksitas karena

²² Lexy J. Moleong, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 6.

²³ Rulam Ahmadi, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, hlm. 16.

cenderung meneliti manusia yang merupakan makhluk sosial dan sering berinteraksi serta berubah-ubah seiring dengan bertambahnya waktu.

Metode penelitian kualitatif yang dipilih oleh penulis menggunakan jenis metode deskriptif, dimana metode tersebut dapat membantu penulis dalam menjelaskan keadaan atau fenomena yang ada dilapangan. Menurut Nazir dalam Andi Prastowo, metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.²⁴ Hal tersebut juga dipertegas oleh Suharsimi Arikunto dalam buku yang sama, bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang sesuatu variabel, gejala, atau keadaan.²⁵ Dapat dikatakan metode deskriptif memiliki data yang masih baru dan belum ditemukan sebelumnya..

3.2 Fokus dan Lokasi Penelitian

Fokus penelitian ini mengenai analisis rasionalitas tindakan Pemerintah Kabupaten Blitar terhadap ilegalitas usaha masyarakat. Ilegalitas usaha masyarakat yang dimaksud adalah usaha pom mini di Kabupaten Blitar. Sudah diketahui bahwa pelaksanaan usaha pom mini dengan nama pertamini memiliki permasalahan dari sisi kelayakan dan peraturannya. Namun meski begitu usaha pom mini di Kabupaten Blitar bisa dikatakan cukup banyak yaitu kurang lebih sebanyak 150

²⁴ Andi Prastowo, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruz Media, Yogyakarta, hlm. 186.

²⁵ *Ibid.*

pom mini sehingga dari hal tersebut perlu diketahui bagaimana rasionalitas Pemerintah kabupaten Blitar dalam melakukan tindakan terhadap usaha pom mini yang dianggap ilegal yang sampai saat ini masih melakukan pengawasan saja. Penelitian ini dilakukan di instansi yang terkait dengan perizinan dan pengawasan usaha pom mini Di Kabupaten Blitar, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar serta beberapa badan pemerintahan, swasta, lsm lain yang mungkin terlibat dalam proses analisis rasionalitas tindakan Pemerintah Kabupaten Blitar terhadap ilegalitas usaha pom mini di Kabupaten Blitar. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan pada pengusaha pom mini dan masyarakat sekitarnya.

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

Penulis menggunakan dua jenis data dalam melakukan penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data memiliki peranan penting dalam menjalankan sebuah penelitian. Keakuratan yang dimiliki data nantinya akan menjadikan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Berikut merupakan data primer dan data sekunder yang dimaksud:

a. Data Primer

Data primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan oleh orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya dan data tersebut sebelumnya tidak ada.²⁶ Data tersebut dapat penulis temukan melalui proses wawancara dengan narasumber dan melakukan observasi. Wawancara tersebut

²⁶ Azuar Juliandi, Irfan, dan Saprinan Manurung, 2014, *Metodologi Penelitian Bisnis*, UMSU Press, Medan, hlm. 65.

dilakukan untuk menjawab berbagai macam pertanyaan yang penulis ajukan kepada informan atau narasumber terkait dengan pembahasan penelitian penulis. penulis juga melakukan observasi pada lingkungan sekitar subjek penelitian dan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh seseorang atau dari peneliti lain. Data sekunder dapat ditemukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen. Dokumen tersebut bisa dalam bentuk data lembaga pemerintah atau dari penelitian terdahulu. Selain itu, data sekunder dapat juga ditemukan didalam media cetak atau elektronik seperti buku, majalah, surat kabar, internet, dan media lainnya. Dokumen yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah surat edaran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur untuk kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi perdagangan se-jawa timur perihal pompa ukur pertamini, surat edaran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur untuk pengusaha pertamini perihal pompa ukur pertamini, Data jenis dan jumlah alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) tera/tera ulang tahun 2017, Kabupaten Blitar dalam angka 2018, dan statistik daerah Kabupaten Blitar 2018.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dibutuhkan untuk memudahkan penulis dalam mengumpulkan data dan menjawab pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah

penelitian ini. teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

3.4.1. Observasi

Observasi dapat dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung berarti penulis secara langsung berinteraksi dengan objek penelitian dan melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian tersebut. kebalikan dari observasi langsung, observasi tidak langsung dapat dilakukan dengan cara melakukan pengamatan melalui foto maupun video mengenai objek penelitian. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi diantara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan.²⁷ Alasan peneliti melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia, dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.²⁸ Penulis dalam hal ini melakukan observasi langsung pada lembaga pemerintah terkait dengan permasalahan pom mini, pengusaha pom mini, lingkungan sekitar kegiatan usaha pom mini dan masyarakat pengguna BBM dari usaha pom mini

3.4.2. Wawancara

Penelitian kualitatif yang dilakukan oleh penulis sangat mengandalkan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Wawancara merupakan salah satu

²⁷ Juliansyah Noor, 2011, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah Edisi Pertama*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.140.

²⁸ *Ibid.*

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.²⁹ Melakukan wawancara memerlukan beberapa hal sebagai pendukung dalam proses wawancara tersebut, sehingga proses wawancara dapat berjalan dengan nyaman dan lancar antara pihak pewawancara dengan yang diwawancarai. Beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang peneliti saat mewawancarai responden yaitu intonasi suara, kecepatan berbicara, sensitivitas pertanyaan, kontak mata, dan kepekaan nonverbal.³⁰

Terdapat dua jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Kedua jenis wawancara tersebut dapat digunakan penulis dalam penelitian ini. Dalam wawancara terstruktur peneliti memberikan pertanyaan kepada para responden dengan pertanyaan yang isi dan strukturnya telah ditentukan, dirancang dan ditulis oleh peneliti.³¹ Sedangkan wawancara tak terstruktur dilakukan tanpa harus merancang isi pertanyaan sebelumnya, pertanyaan dapat dibuat pada waktu kejadian wawancara tersebut berlangsung. Kekuatan utama wawancara tak terstruktur ini adalah kebebasan yang diberikan kepada peneliti, dalam hal isi dan struktur wawancara memungkinkan para peneliti melakukan kajian yang lebih mendalam dan sesuai dengan apapun yang dikehendakinya.³²

²⁹ *Ibid.*, hlm. 138.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 139.

³¹ Restu K. Widi, 2010, *Asas Metodologi Penelitian (Sebuah Pengenalan Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 242.

³² *Ibid.*, hlm. 241.

Teknik penentuan informan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tekning sampling bertujuan (*purposive sampling*). Teknik ini digunakan karena penulis telah menetapkan informan sebelumnya secara khusus yang benar-benar mampu menjawab pertanyaan-pertanyaam yang menyangkut tujuan dan permasalahan penelitian. Berikut beberapa informan yang telah dipilih oleh penulis terkait dengan penelitian ini:

Tabel 3.1
Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Keterangan
1.	Purwanto, S.Sos	Kepala Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar
2.	Sugeng Hariyanto	Staff Penerima Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar
3.	Emiliana Rahmawati	Kasi Validasi Perijinan I Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar
4.	M. Nurhidayat	Kasi Penerbitan Perijinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar
5.	Ruslan	Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah Kabupaten Blitar
6.	Suhardjono	Seksi Pengawasan Barang Beredar UPT. Perlindungan Konsumen Malang.
7.	Rudi Wibowo	Pemilik usaha pom mini
8.	Adam	Pemilik usaha pom mini
9.	Dadik Setiyo Wahyudi	Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia di Blitar
10.	Arif	Media (koran memo)
11.	Solikin	Distributor pom mini
12.	Roni Setiadi	Warga sekitar usaha pom mini
13.	Rini	Warga sekitar usaha pom mini

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2018

3.4.3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi berarti mengumpulkan berbagai macam informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dengan teknik ini penulis dapat mengetahui informasi pada masa lalu terkait dengan penelitian ini. Secara detail, bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di *server* dan *flashdisk*, dan data tersimpan di website.³³ Data atau dokumen yang penulis dapatkan dapat berupa *soft file* maupun *hardfile*. Dokumen-dokumen pemerintah yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat berupa peraturan-peraturan terkait dengan usaha pom mini, jumlah spbu di Kabupaten Blitar dan sebagainya.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik dalam menganalisis data diperlukan penulis untuk memudahkan dalam mengolah data-data yang telah didapatkan selama proses penelitian berlangsung. Menurut Bogdan & Biklen dalam Imam Gunawan, menyatakan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.³⁴ Proses dalam analisis data dilakukan pada saat proses pengumpulan

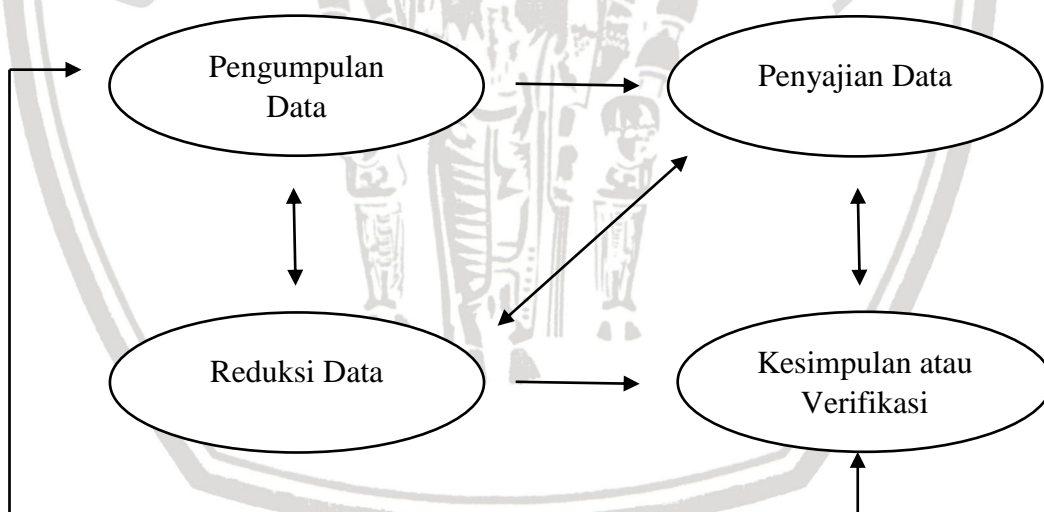
³³ Juliansyah Noor, *Op. Cit.*, hlm. 141.

³⁴ Imam Gunawan, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 210.

data berlangsung, bahkan sampai dengan proses pengumpulan data selesai kegiatan analisis data masih tetap dilakukan.

Penulis menggunakan teknik analisis data yang diperkenalkan oleh Miles & Huberman dalam penelitian ini. Miles & Huberman mengemukakan empat tahapan-tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data, reduksi data (*data reduction*); (2) penyajian data (*data display*) dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verifying*). Berikut penjelasan dari empat tahapan tersebut:

Bagan 3.1
Komponen-Komponen Analisis Data : Model Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman .2014.*Analisis Data Kualitatif*.Jakarta:UI Press.hlm.20

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan pada saat seluruh proses dalam penelitian. Data-data yang dihimpun nantinya dapat digunakan sebagai penunjang dalam

penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan banyak hal seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti juga meliputi hal tersebut. Wawancara yang dilakukan oleh penulis memiliki narasumber yang terdiri dari aktor pemerintah, pengusaha pom mini, lembaga swadaya masyarakat, media dan masyarakat. Peneliti melakukan observasi di sekitar lingkungan usaha pom mini dan lembaga pemerintahan. Pengumpulan data dengan dokumentasi bisa didapatkan dari media cetak, internet, maupun data-data dari pemerintah.

b. Reduksi Data

Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (*written-up field notes*).³⁵ Dapat diartikan proses reduksi data merupakan proses mengolah data dan merangkum data yang telah penulis temukan dalam proses pengumpulan data. Proses pengumpulan data ini, penulis dapat lebih memfokuskan data yang dibutuhkan dalam penelitian dan mengurangi data yang tidak dibutuhkan dalam penelitian ini.

c. Penyajian Data

Proses selanjutnya setelah reduksi data adalah penyajian data. Penyajian data dapat diartikan menampilkan data-data pada pembahasan penelitian dalam bentuk tabel, tulisan, grafik dan bentuk yang lain. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan

³⁵ Muri Yusuf, *Op. Cit.*, hlm. 407.

berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.³⁶ Proses penyajian data ini dapat memudahkan penulis dalam menarik kesimpulan terhadap penelitian yang telah penulis lakukan.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah pada penelitian ini setelah melakukan analisis data. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan.³⁷

³⁶ Imam Gunawan, *Op. Cit.*, hlm. 211.

³⁷ Afrizal, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 180.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

Bab keempat terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan mengenai gambaran umum dari lokasi dilaksanakannya penelitian ini. Sub bab tersebut diantaranya adalah gambaran umum Kabupaten Blitar, Pemerintah Kabupaten Blitar dan usaha pom mini di kalangan masyarakat Kabupaten Blitar.

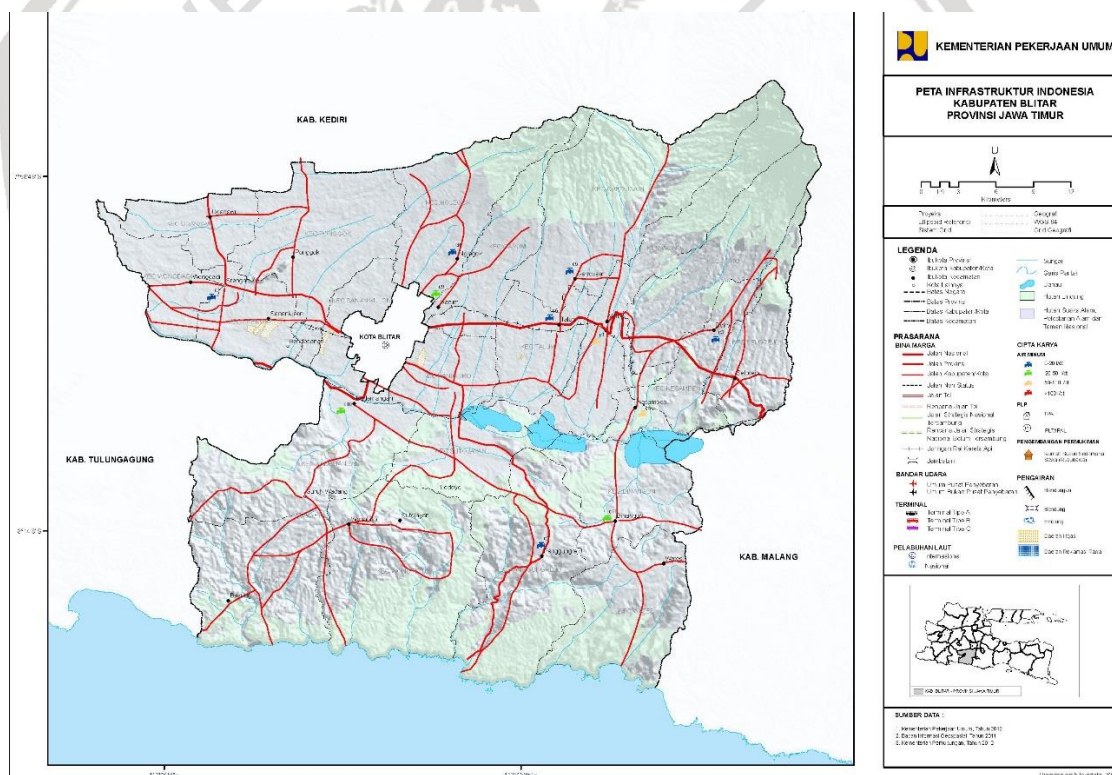
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar terletak di ujung selatan Provinsi Jawa Timur dengan pusat pemerintahan yang terletak di Kecamatan Kanigoro. Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 1.588,79 KM dengan tata guna tanah terinci sebagai Sawah, Pekarangan, Perkebunan, Tambak, Tegal, Hutan, Kolam Ikan dan lain-lain.³⁸ Kabupaten Blitar di pisah menjadi dua bagian oleh aliran sungai brantas yang setiap bagian tersebut memiliki potensinya masing-masing. Bagian utara atau dapat disebut Blitar utara memiliki dataran rendah, lahan sawah dan beriklim basah. Blitar utara dekat dengan gunung berapi yang masih aktif dan terdapat banyak aliran sungai sehingga memiliki tanah yang lebih subur. Sedangkan bagian selatan atau Blitar selatan memiliki dataran rendah maupun dataran tinggi, lahan kering dan memiliki iklim kering. Hal tersebut dikarenakan Blitar Selatan berada di daerah pegunungan berbatu dan daerah pesisir sehingga memiliki tanah yang kurang subur.

³⁸ <http://www.blitarkab.go.id/2012/06/06/gambaran-umum-2/> , diakses pada tanggal 15 November 2018, pukul 13.59 WIB.

Kabupaten Blitar secara geografis terletak pada 111 25' – 112 20' Bujur Timur dan 7 57-8 9'51 Lintang Selatan. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Blitar memiliki beberapa batas daerah yaitu bagian utara dibatasi oleh Kabupaten Kediri, bagian timur dibatasi oleh Kabupaten Malang, bagian selatan dibatasi oleh Samudra Indonesia, bagian barat dibatasi oleh Kabupaten Tulungagung dan bagian tengah Kabupaten Blitar berbatasan dengan Kota Blitar. Secara jelasnya dapat dilihat pada peta Kabupaten Blitar tersebut.

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Blitar



Sumber: <http://loketpeta.pu.go.id/peta-infrastruktur-kabupaten-blitar-2014> diakses pada tanggal 15 November 2018, pukul 14.49 WIB

Tabel 4.1
Luas Wilayah , Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan Tahun 2017

No.	Kecamatan	Luas Wilayah Area (km ²)	Kelurahan	Desa
1.	Bakung	111,24	-	11
2.	Wonotirto	164,54	-	8
3.	Panggungrejo	119,04	-	10
4.	Wates	68,76	-	8
5.	Binangun	76,79	-	12
6.	Sutojayan	44,20	7	4
7.	Kademangan	105,28	1	14
8.	Kanigoro	55,55	2	10
9.	Talun	49,78	4	10
10.	Selopuro	39,29	-	8
11.	Kesamben	56,96	-	10
12.	Selorejo	52,23	-	10
13.	Doko	70,95	-	10
14.	Wlingi	66,36	5	4
15.	Gandusari	88,23	-	14
16.	Garum	54,56	4	5
17.	Nglegok	92,56	1	10
18.	Sanankulon	33,33	-	12
19.	Ponggok	103,83	-	15
20.	Srengat	53,98	4	12
21.	Wonodadi	40,35	-	11
22.	Udanawu	40,98	-	12

Sumber: Data olahan penulis berdasarkan Kabupaten Blitar Dalam Angka 2018

Jumlah kecamatan di Kabupaten Blitar sebanyak 22 kecamatan. Kabupaten Blitar memiliki 28 kelurahan dan 220 desa yang. Selain itu, jumlah dusun/ lingkungan sebanyak 765, jumlah RW sebanyak 1982 dan jumlah RT sebanyak 7046. Kecamatan Wonotiro menjadi kecamatan terluas di Kabupaten Blitar. Sedangkan Kecamatan Wates menjadi kecamatan yang letaknya paling jauh dari ibukota Kabupaten Blitar.

4.1.1. Kondisi Demografi

Berdasarkan proyeksi sensus penduduk tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Blitar mencapai 1.153.803 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terdiri dari 532.149 jiwa penduduk laki-laki dan 532.464 jiwa penduduk perempuan. Jika jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dibuat presentase menjadi 50,10% penduduk laki-laki dan 49,91% penduduk perempuan, dengan sex ratio sebesar 100,38 persen yang berarti dalam 100 jiwa penduduk perempuan ada sebanyak 100-101 jiwa penduduk laki-laki.³⁹ Untuk lebih rinci dan jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2.
Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Sex Ratio, dan Jenis Kelamin Tahun 2017

No.	Kecamatan	Penduduk		Jumlah	Sex Ratio (%)
		Laki laki	Perempuan		
1.	Bakung	12 487	13 017	25 504	96,93
2.	Wonotirto	18 035	17 862	35 897	100,97
3.	Panggungrejo	20 573	20 660	41 233	99,58
4.	Wates	14 095	14 059	28 154	100,25
5.	Binangun	21 794	21 702	43 436	100,42
6.	Sutojayan	23 592	24 148	47 740	97,70
7.	Kademangan	32 628	32 658	65 286	99,90
8.	Kanigoro	39 149	38 500	77 642	101,69
9.	Talun	30 215	30 453	60 668	99,21
10.	Selopuro	20 328	19 709	40 037	103,14
11.	Kesamben	24 334	24 968	49 302	97,46
12.	Selorejo	17 476	17 893	35 369	97,67
13.	Doko	19 122	19 160	38 282	99,80
14.	Wlingi	25 560	25 397	50 957	100,64
15.	Gandusari	34 097	33 499	67 596	101,79
16.	Garum	32 954	32 382	65 336	101,77
17.	Nglegok	35 207	34 804	70 011	101,16
18.	Sanankulon	28 144	28 122	56 266	100,08
19.	Ponggok	51 539	50 253	101792	102,56

³⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, *Kabupaten Blitar Dalam Angka 2018*, hlm. 67

20.	Srengat	32 630	32 852	65 482	99,32
21.	Wonodadi	23 410	23 477	46 847	99,71
22.	Udanawu	20 713	20 213	40 926	102,47
Kabupaten Blitar					
Tahun	2017	578 015	575 788	1 153 803	100,38
	2016	575 877	573 833	1 149 710	100,36
	2015	573 707	571 689	1 145 396	100,35
	2014	571 303	569 490	1 140 793	100,32
	2013	568 596	568 105	1 136 701	100,09

Sumber: Data olahan penulis berdasarkan Kabupaten Blitar Dalam Angka 2018

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Blitar terus mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga tahun 2014. Kabupaten Blitar yang luas wilayahnya sebesar 1.588,79 km² dan jumlah penduduk mencapai 1.153.803 jiwa memiliki kepadatan penduduk sebesar 726 jiwa/km² di tahun 2017. Kecamatan di Kabupaten Blitar yang wilayahnya memiliki kepadatan penduduk terbesar adalah Kecamatan Sanankulon dengan kepadatan penduduk sebesar 1.668 jiwa/km². Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa diantara 22 kecamatan di Kabupaten Blitar, kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Ponggok dengan jumlah penduduk sebesar 101.792 jiwa.

4.1.2. Perekonomian Kabupaten Blitar

Laju pertumbuhan perekonomian suatu daerah tertentu dapat diketahui dengan melihat perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB) pada wilayah tersebut. Dalam PDRB juga sudah digambarkan laju pertumbuhan daerah pada kurun waktu tertentu. Laju pertumbuhan PDRB juga dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah. PDRB dapat menunjukan besaran kontribusi seluruh unit usaha atau lapangan usaha dalam memberikan nilai tambah terhadap perekonomian suatu daerah tertentu. Kabupaten Blitar sendiri

memiliki PDRB yang naik turun sepanjang tahun 2013-2017, untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (%)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	35,25	35,87	36,05	35,25	34,29
B	Pertambangan dan Penggalan	4,10	4,42	4,21	4,16	4,18
C	Industri Pengolahan	12,82	12,75	12,83	12,90	13,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,05	0,05	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	8,96	9,13	8,98	9,26	9,48
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,20	16,73	16,95	17,44	17,86
H	Transportasi dan Pergudangan	1,16	1,19	1,21	1,21	1,27
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	0,85	0,86	0,87	0,92	0,95
J	Informasi dan Komunikasi	5,21	4,93	4,90	4,95	5,05
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,31	2,32	2,30	2,33	2,32
L	<i>Real Estate</i>	1,81	1,74	1,79	1,78	1,78
M,N	Jasa Perusahaan	0,35	0,33	0,33	0,33	0,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	3,64	3,32	3,25	3,25	3,20
P	Jasa Pendidikan	4,12	4,17	4,11	4,03	3,98
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0,75	0,77	0,76	0,74	0,75
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,37	1,37	1,38	1,34	1,33
PDRB Kabupaten Blitar		100	100	100	100	100

Sumber: Data olahan penulis berdasarkan Kabupaten Blitar Dalam Angka 2018

Menurut tabel diatas, perkembangan PDRB Kabupaten Blitar cenderung mengalami peningkatan meski tidak secara signifikan dan ada beberapa lapangan

usaha yang justru turun. Meski ada beberapa yang turun tidak terlalu signifikan juga. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar didominasi oleh tiga lapangan usaha, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyumbangkan nilai tambah yang paling besar diantara lapangan usaha yang lain, yaitu sebesar 34,29%. Meskipun angka tersebut lebih sedikit daripada pada tahun 2016. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memiliki nilai tambah terbesar kedua, yaitu 17,86%. Presentase tersebut naik dan lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya sejak tahun 2013. Ketiga, Industri Pengolahan sebesar 13,16%. Presentase tersebut juga naik dan lebih tinggi sejak tahun 2013.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar mata pencaharian masyarakat Kabupaten Blitar ada pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Kabupaten Blitar merupakan salah satu sentra pemasok telur ayam yang cukup besar. Kabupaten Blitar memasok sekitar 50% kebutuhan telur di DKI Jakarta atau sekitar 125 ton per bulan. Populasi ayam ras petelur pada tahun 2017 mencapai 15,37 juta ekor, mengalami peningkatan hampir 1,29 persen dari tahun sebelumnya, sehingga mempengaruhi produksi telur pada saat itu. Pada Tahun 2017 produksi telur ayam ras meningkat 1,42 persen dari tahun 2016.⁴⁰ Hasil dari sektor pertanian akan lebih menguntungkan lagi apabila sebelum langsung dijual melalui proses pengolahan terlebih dahulu yang nantinya akan berdampak baik pada sektor industri pengolahan. Lebih berkembangnya industri pengolahan tentu akan

⁴⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, *Statistik Daerah Kabupaten Blitar 2018*, hlm. 11

memberikan dampak positif terhadap sektor usaha lainnya karena nantinya akan melibatkan atau membutuhkan dukungan dari sektor/lapangan usaha yang lainnya. Kabupaten Blitar memiliki berbagai macam industri pengolahan diantaranya yaitu industri dari kulit, industri logam mulia dan bahan dari logam, industri dari kayu, industri anyaman, industri dari kain tenun, industri gerabah/keramik/batu, industri makanan dan minuman serta industri yang lainnya.

Kegiatan usaha pom mini termasuk dalam perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Pelaku usaha pom mini memperjual belikan bahan bakar minyak eceran kepada masyarakat. Jumlah presentase yang cukup besar menandakan bahwa perdagangan eceran memiliki kontribusi yang cukup besar pula terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten Blitar. Para pelaku usaha pom mini mematok harga yang beragam untuk setiap satu liter pertalie maupun pertamax. Ada sebagian pengusaha pom mini yang mengambil untung seribu rupiah dan ada juga yang mengambil untung 600 rupiah. Dari untung tersebut memanglah tidak semuanya masuk kantong pelaku usaha karena harus dibagi untuk pengeluaran lain seperti pembayaran untuk listrik atau membayar karyawan jika menggunakan jasa orang lain. Wadah penyimpanan didalam pom mini dapat menampung sekitar 200 liter sehingga jika usaha pom mini menghabiskan 200 liter dengan keuntungan 600 rupiah maka uang yang dihasilkan sebesar 120.000 rupiah. Dalam sehari keuntungan dalam usaha pom mini minimal mendapatkan untung sebesar 100.000 rupiah. Jika di dihitung dalam sebulan pengusaha pom mini dapat meraup penghasilan sebesar 3.000.000 rupiah, keuntungan yang cukup besar sehingga tidak sampai setengah tahun pengusaha pom mini sudah dapat balik

modal. Itupun dengan perhitungan minimal pendapatan yang dapat diambil, tentu pengusaha pom mini mendapatkan kemungkinan penghasilan yang lebih besar lagi.

4.2. Pemerintah Kabupaten Blitar

Sejak tahun 2016 Kabupaten Blitar dipimpin oleh Bapak Drs. H. Rijanto, MM yang menjabat selaku Bupati Blitar dan dibantu oleh Bapak Marhaenis Urip Widodo, S.Sos. yang menjabat sebagai Wakil Bupati Blitar. Keduanya menjabat selama periode tahun 2016 hingga tahun 2021. Setelah dibuatnya PP No. 3 Tahun 2010, Ibu Kota Kabupaten Blitar yang sebelumnya berada di Kota Blitar pindah diwilayahnya sendiri yaitu di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Meski pusat pemerintahan telah berpindah, tidak semua lembaga pemerintahan berpindah ke lokasi tersebut, sebagian masih berada di Kota Blitar.

Dalam menjalankan tugasnya, Bupati Blitar tidak hanya dibantu oleh Wakil Bupati saja. Melainkan juga dibantu oleh beberapa staf ahli. Staf ahli memiliki beberapa bidang yaitu meliputi Bagian Hukum, Bagian Ekonomi Pembangunan, Bagian Organisasi, Bagian Humas dan Protokol, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perlengkapan, Bagian Layanan Pengadaan, Bagian Umum, dan Bagian Pemerintahan. Selain itu, demi terselenggaranya pemerintahan yang baik Bupati Kabupaten Blitar juga dibantu oleh dinas atau instansi daerah yang meliputi : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Satpol PP, RSUD, enam Badan, sembilan belas Dinas, dan dua puluh dua Kecamatan. Dari 22 Camat tersebut didukung oleh staf dan jajaran dibawahannya yaitu 220 orang Kepala Desa beserta staf, 28 orang Lurah beserta staf dan didukung oleh 765 orang Kepala

Dusun/Lingkungan, 1.982 orang Ketua RW (Rukun Warga) dan 7.046 orang Ketua RT (Rukun Tetangga).⁴¹

4.2.1. Visi Misi Kabupaten Blitar

Selama periode tahun 2016-2021 Pemerintah Kabupaten Blitar yang dipimpin Drs. H. Rijanto, MM selaku Bupati Blitar dan Marhaenis Urip Widodo, S.Sos. selaku Wakil Bupati Blitar memiliki visi, yaitu “Menuju kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju, dan Berdaya Saing”. Untuk memahami lebih jelas isi dari visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut,⁴²

1. Lebih Sejahtera, berarti meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Secara lahir adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara baik, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kesejahteraan secara batin diwujudkan dalam penciptaan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif, serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
2. Maju, dimaknai dengan adanya perkembangan positif dalam setiap aspek kehidupan masyarakat terutama terkait dengan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM), tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik .

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 3

⁴² <http://www.blitarkab.go.id/2016/02/24/visi-dan-misi-kabupaten-blitar/> diakses pada tanggal 19 November 2018, pukul 13.30 WIB.

3. Berdaya Saing, yaitu terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Blitar untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional.

Visi Kabupaten Blitar tersebut tidak dapat terwujud tanpa adanya misi-misi yang harus dijalankan. Adanya misi ini dapat menjadi sebuah acuan bagi penyelenggara pemerintahan untuk menjalankan tugas dan fungsinya agar selaras dengan visi atau tujuan yang telah ditentukan. Misi pembangunan Kabupaten Blitar selama tahun 2016 hingga tahun 2021 ditetapkan sebagai berikut:⁴³

1. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran;
2. Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan sosial, serta penerapan peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk di dalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi;

⁴³ *Ibid.*

5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Visi dan misi Kabupaten Blitar ini tentu memiliki pengaruh terhadap kegiatan usaha ekonomi masyarakat, yaitu usaha pom mini. Salah satu visi pemerintah Kabupaten Blitar adalah memajukan Kabupaten Blitar lebih sejahtera. Pengertian lebih sejahtera dalam hal ini lebih difokuskan lagi terhadap peningkatan pendapatan dan peningkatan kesempatan kerja. Keberadaan usaha pom mini yang marak di Kabupaten Blitar merupakan cara bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dan membuka peluang kesempatan kerja lebih besar lagi.

4.3. Usaha Pom Mini Di Kabupaten Blitar

Perkembangan pom mini di Kabupaten Blitar tidak serta merta ada. Ada berbagai macam faktor pendukung yang membuat masyarakat Kabupaten Blitar tertarik untuk melakukan bisnis pom mini tersebut. Awal mula keberadaan pom mini berangkat dari penjualan eceran bahan bakar minyak yang dijual masyarakat dengan menggunakan botol berukuran satu liter. Namun untuk Kabupaten Blitar sendiri bukan sebagai wilayah yang pertama kali memunculkan penggunaan pom

mini sebagai cara baru menjual BBM eceran melainkan dari kota atau wilayah lain. Masyarakat Kabupaten Blitar sendiri awal mula mengetahui adanya alat pom bensin mini dari internet dan kemudian tertarik untuk melakukan bisnis yang serupa.

Pom mini atau biasa disebut pertamini mulai muncul di Kabupaten Blitar pada tahun 2014. Pada tahun tersebut masih sangat jarang sekali masyarakat melakukan bisnis pom mini sehingga peluang usaha masih sangat tinggi. Keberadaan usaha pom mini didukung dengan tidak meratanya distribusi keseluruhan masyarakat Kabupaten Blitar. Banyak lokasi di Kabupaten Blitar yang jauh dari jangkauan SPBU sehingga keberadaan pom mini sangat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak. Semakin bertambah tahun populasi usaha pom mini semakin tinggi dan banyak diminati oleh kalangan masyarakat dengan melihat potensi dari usaha pom mini tersebut. Mulai maraknya pom mini di Kabupaten Blitar dimulai pada tahun 2017 hingga saat ini.

Potensi usaha yang tinggi ternyata tidak sejalan dengan proses perizinan usaha tersebut. Alat ukur digital yang tidak standart dan kemungkinan keamanan alat yang tidak memadai membuat alat pom mini tidak diberikan tanda izin pabrik. Hal tersebutlah yang membuat usaha pom mini ini menjadi ilegal. Alat digital pom mini yang sangat rawan diubah-ubah oleh pemilik usaha tersebut membuat tindak kecurangan penjualan tinggi sehingga masyarakat yang menjadi konsumen rawan dirugikan. Selain itu keamanan yang belum memadai menjadi momok tersendiri. Alat pom mini sangat rawan meledak atau terbakar mengingat belum diketahuinya kualitas dari bahan yang digunakan untuk membuat alat tersebut. Harga yang

ditawarkan oleh pengusaha pom mini pun lebih mahal daripada harga yang ditawarkan di SPBU. Meski demikian, masyarakat selaku konsumen tetap melakukan transaksi jual beli BBM eceran karena jauhnya lokasi SPBU yang ada. Hingga saat inipun tidak adanya laporan dari masyarakat untuk pemerintah terkait adanya masyarakat yang telah dirugikan oleh jual beli BBM eceran dengan pom mini atau pertamini.

4.3.1. Rasionalitas Masyarakat Kabupaten Blitar Memilih Usaha Pom Mini

Ada berbagai macam alasan rasional bagi masyarakat Kabupaten Blitar memilih untuk melakukan usaha pom mini. Pertama, lokasi SPBU yang berjauhan dengan beberapa lokasi tempat tinggal masyarakat Kabupaten Blitar. Kedua, modal yang tidak terlalu besar. Ketiga, bisnis yang kegiatan kerjanya relatif mudah dan minim terhadap kerugian. Keempat, termasuk bisnis yang masih baru dan memiliki daya tarik tersendiri di kalangan masyarakat. Kelima, alat pom mini mudah dalam proses pembelianya dan barang (BBM) yang dijual tidak sulit untuk dicari. Keenam, Keuntungan dari usaha pom mini yang relatif besar.

Jumlah SPBU di Kabupaten Blitar sebanyak 28 titik. Dari jumlah tersebut masih ada beberapa kecamatan yang tidak memiliki SPBU. Sedangkan pengguna kendaraan bermotor cukup banyak sehingga kebutuhan terhadap bahan bakar minyak juga cukup banyak. Selain itu, bahan bakar minyak tidak hanya untuk melakukan perjalanan saja melainkan juga untuk keperluan pekerjaan. Kemudahan akses dalam pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga keberadaan pom mini disambut baik oleh masyarakat karena memberikan kemudahan akses dalam membeli BBM eceran.

“SPBU jauh mas, kan sudah ada yang dekat jadi ya saya beli disini saja. Rumah saya disana lo mas, dekat dari sini. Jadi saya pilih beli disini saja mas. Nanti kalau beli jauh-jauh berkurang lagi bensin saya mas. Jadi sayang di bensin sama uangnya buat beli juga mas. Jadi bukan saya lebih senang beli di sini enggak mas, tapi ya memang dekat saja mas.”⁴⁴

Seperti penuturan Rini sebagai salah satu konsumen BBM eceran pertamini, dia merasa diuntungkan dengan kehadiran pom mini yang dekat dengan lokasi rumahnya karena tidak perlu membeli BBM yang cukup jauh di SPBU.

Modal yang harus dikeluarkan pelaku usaha pom mini tidaklah cukup besar. Hanya mengeluarkan dana sekitar 8 juta sudah dapat memboyong alat dispenser pom mini. Ada pula pom mini yang memiliki harga puluhan juta rupiah. Dari kisaran harga tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Mulai dari kualitas dari bahan membuat alat pom mini dan jumlah *nozzle* (corong) pada pom tersebut. Semakin banyak jumlah *nozzle* akan semakin mahal pula alat pom mini. Kebanyakan para pelaku usaha pom mini maksimal hanya menggunakan pom mini dengan *nozzle* maksimal berjumlah dua. Pom mini yang memiliki dua *nozzle* berharga 20 juta. Harga tersebut sudah disertai dengan alat pemadam kebakaran berukuran kecil sebagai salah satu alat penunjang keamanan pom mini. Pembelian pom mini juga memiliki garansi selama satu tahun. Selama kurun waktu satu tahun tersebut apabila terjadi kerusakan maka teknisi dari produsen pom mini akan datang langsung ke tempat pemilik usaha pom mini sehingga menambah kepercayaan dan mengurangi kekhawatiran pelaku usaha terhadap alat pom mini. Dengan modal sebanyak itu pengusaha pom mini bisa langsung melakukan bisnisnya, namun ada beberapa

⁴⁴ Berdasarkan wawancara penulis dengan Rini selaku masyarakat Kabupaten Blitar pada tanggal 15 Oktober 2018 pukul 14.53 WIB.

pengusaha pom mini yang menambahkan bangunan tertentu untuk menunjang bisnisnya dan menarik minat dari masyarakat seperti membangun atap di atas alat pom mini dan memberikan pondasi sebagai tempat duduk alat pom mini. Tentu hal tersebut akan menambah dana tersendiri namun tetap setimpal dengan hasil yang diperoleh dalam usaha pom mini.

Pom mini merupakan bisnis yang mudah dan tidak melelahkan untuk dilakukan. Para pelaku usaha cukup menunggu konsumen atau pelanggan datang ke tempat pom mini. Barang yang diperjual belikan termasuk barang jangka panjang atau tidak memiliki masa berlaku pemakaian sehingga minim terjadinya kerugian. Jikalau hari ini tidak laku maka dapat diperjual belikan keesokan harinya. Menurut pelaku usaha pom mini, bisnis ini merupakan usaha yang tergolong minim terhadap resiko, seperti yang dikatakan oleh Rudi Wibowo;

“pertimbangan saya kan kalo saya usaha pom itu kan banyak dibutuhkan pertama itu kan dan minim resiko dalam arti tidak gampang rusak tidak gampang busuk kayak makanan gitu aja lo , gitu aja saya pertimbangannya, ada yang perlu atau ada yang membutuhkan. Kedua minim resiko kerusakan dari alat, kalo makanan kan saya tau resikonya seperti apa kayak buah kan gitu, gitu aja saya pertimbangannya, saya kan awal-awal itu disini kan belum ada yang usaha begini jadi peluang saya kan masih besar gitu aja pertimbangannya.”⁴⁵

Jika usaha pom mini dikatakan minim terhadap resiko sebenarnya tidak bisa dianggap seperti itu. Apabila diperbandingkan dengan usaha lain seperti usaha makanan memang lebih minim terhadap kerugian. Alat ukur dari pom mini tidak diketahui secara pasti kualitas bahannya dan tidak diketahui hingga kapan alat

⁴⁵ Berdasarkan wawancara penulis dengan Rudi Wibowo selaku pemilik usaha pom mini pada tanggal 31 Oktober pukul 12.03 WIB.

tersebut tetap layak untuk dipergunakan sehingga resiko terhadap kemungkinan kerusakan maupun kebakaran masih tetap tinggi.

Pom mini di Kabupaten Blitar masih dianggap hal baru di kalangan masyarakat. Terlihat dari antusias masyarakat dalam memilih membeli bahan bakar minyak di pom mini daripada membeli BBM eceran dalam bentuk botol satu liter. Ketertarikan masyarakat lebih kepada bentuk pertamini yang sangat menyerupai pom yang berada di SPBU milik PT.Pertamina seperti alat ukur digital, bentuk persegi pom, himbauan larangan saat pengisian bahan bakar dan sebagainya. Beberapa masyarakat pun ada yang beranggapan bahwa pertamini adalah kepanjangan tangan dari bisnis Pertamina sehingga tidak ragu bagi masyarakat yang masih awam membeli bahan bakar minyak di pom mini. Ada beberapa masyarakat yang masih belum mengetahui bahwa usaha pom mini merupakan usaha yang ilegal karena tidak memiliki dasar aturan dan melanggar aturan. Anggapan masyarakat tersebut telah memberikan peluang usaha bagi para pengusaha pom mini untuk mengembangkan usaha dan meraup keuntungan yang lebih besar.

Jual beli alat pom mini sudah semakin marak dan banyak sekali. Akses untuk melakukan pembelian alat itupun juga sangat mudah. Banyak situs internet yang menawarkan alat pom mini ini. Selain itu jual beli alat pom mini juga banyak dilakukan di media sosial seperti facebook. Kabupaten Blitar sendiri terdapat distributor yang menyalurkan alat pom mini langsung dari produsen atau pembuat pom mini. Sebenarnya untuk pembuatan pom mini di Kabupaten Blitar sempat ada

namun sekarang sudah tidak ada karena orang yang membuat pom mini ini merasa khawatir terhadap tidak jelasnya peraturan yang mengatur pom mini dan mengarah ke ilegalitas. Namun masih banyak produsen diluar daerah Kabupaten Blitar yang memperjual belikan alat pom mini.

Gambar 5.1.
Situs Internet Penjual Pertamina



Gambar tersebut merupakan salah satu situs internet yang menjual pom mini Pertamina dengan harga yang cukup murah dan memiliki merk tersendiri. Tidak hanya membuat situs internet sendiri untuk melakukan proses penjualan tetapi juga menaruh barang dagangan mereka di situs belanja internet lainnya seperti tokopedia.com dan bukalapak.com. Daerah terdekat yang memiliki produsen atau

pembuat pom mini salah satunya berada di Jombang, Nganjuk, dan Malang. Untuk pembelian bahan bakar minyak sendiri para pelaku usaha pom mini membeli langsung di SPBU milik PT. Pertamina. Pembelian BBM ini biasanya langsung dalam jumlah yang cukup banyak. Karena tidak adanya larangan untuk membeli bahan bakar minyak non subsidi. Bahan bakar minyak subsidi tentu dibatasi dalam jumlah pembeliannya.

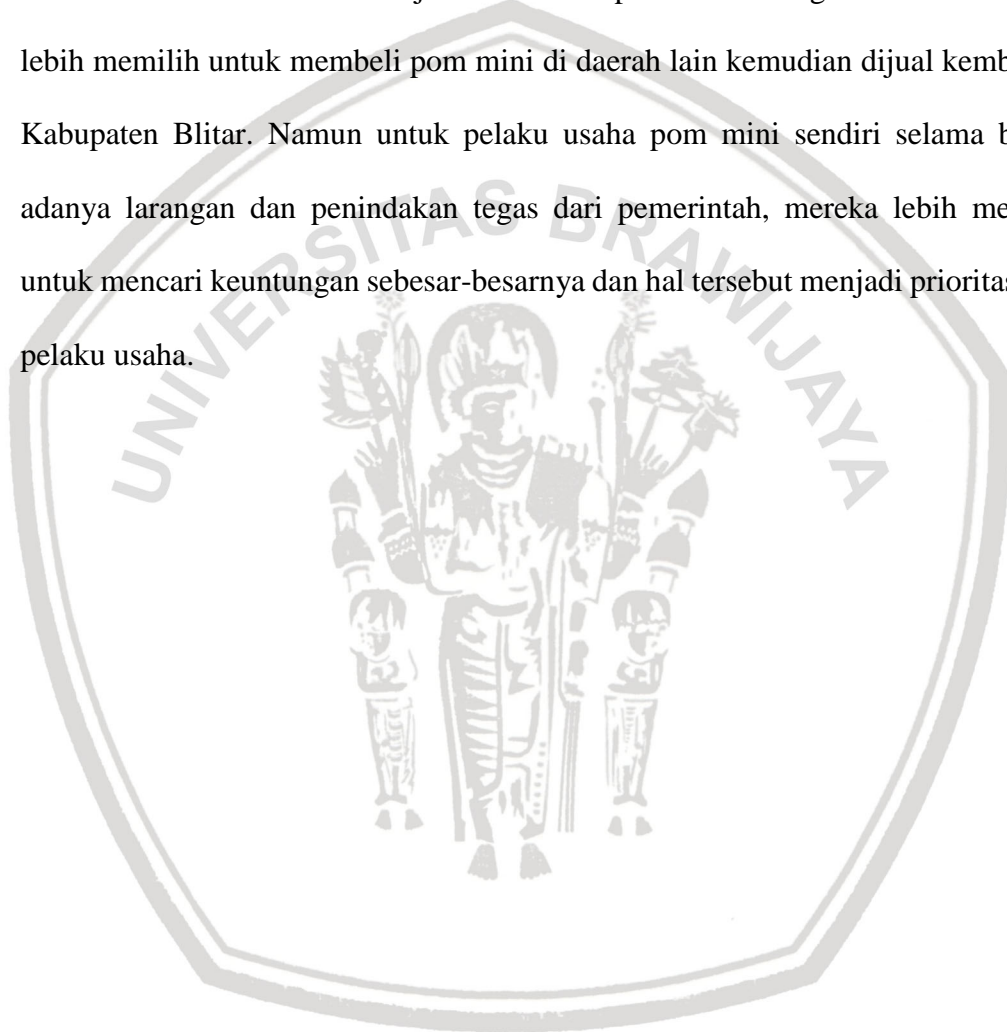
“dulu saya biasanya kan ada pertalite pertamax saya *pake* (memakai) *pick up*(mobil) itu *pake* drim 200L itu masing-masing jadi pertamax 200L pertalitenya 200L, nanti kita tap ke tanki sini dulu gitu , kalau sekarang saya kan juga usaha ini itu jadi saya bagi kadang uangnya kalau terpaksa dananya *mepet* saya *pake* drim kecil dulu 2 atau 3, satu drim itu sekitar 20L , saya biasanya *pake* itu kalau memang dananya *mepet*, kalau dulu memakai drim 200L satu *pick up* (mobil) bisa sampai 600-800L...”⁴⁶

Untuk memangkas biaya transportasi pembelian BBM di SPBU pelaku usaha pom mini membeli dalam jumlah yang sangat banyak. Selain itu, kebutuhan masyarakat yang cukup banyak menjadi salah satu alasan lain pembelian dalam jumlah yang banyak tersebut. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha pom mini sudah sangat menguntungkan. Dapat dilihat dari keuntungan usaha pom mini dalam sehari pelaku usaha dapat mendapatkan keuntungan minimal seratus ribu.

Setiap pelaku usaha pom mini tidak secara keseluruhan memiliki keenam alasan tersebut. Namun dari keseluruhannya dapat dirangkum kedalam enam alasan tersebut. Kebutuhan masyarakat yang cukup besar terhadap BBM dan peluang keuntungan yang besar menjadi alasan utama bagi para pelaku usaha pom mini. Status ilegalitas yang terlabel dalam usaha pom mini tidak menjadi hambatan bagi

⁴⁶ Berdasarkan wawancara penulis dengan Rudi Wibowo selaku pemilik usaha pom mini pada tanggal 31 Oktober pukul 12.03 WIB.

para pelaku usaha dan terkesan telah diabaikan oleh mayoritas pemilik usaha pom mini. Memang ada kekhawatiran terhadap status tersebut. Dahulu terdapat produsen atau pembuat pom mini di Kabupaten Blitar, tetapi dengan adanya ketidakjelasan perizinan mereka lebih memilih untuk tidak membuat pom mini sendiri dan lebih memilih menjadi distributor pom mini. Dengan kata lain mereka lebih memilih untuk membeli pom mini di daerah lain kemudian dijual kembali di Kabupaten Blitar. Namun untuk pelaku usaha pom mini sendiri selama belum adanya larangan dan penindakan tegas dari pemerintah, mereka lebih memilih untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dan hal tersebut menjadi prioritas para pelaku usaha.



BAB 5

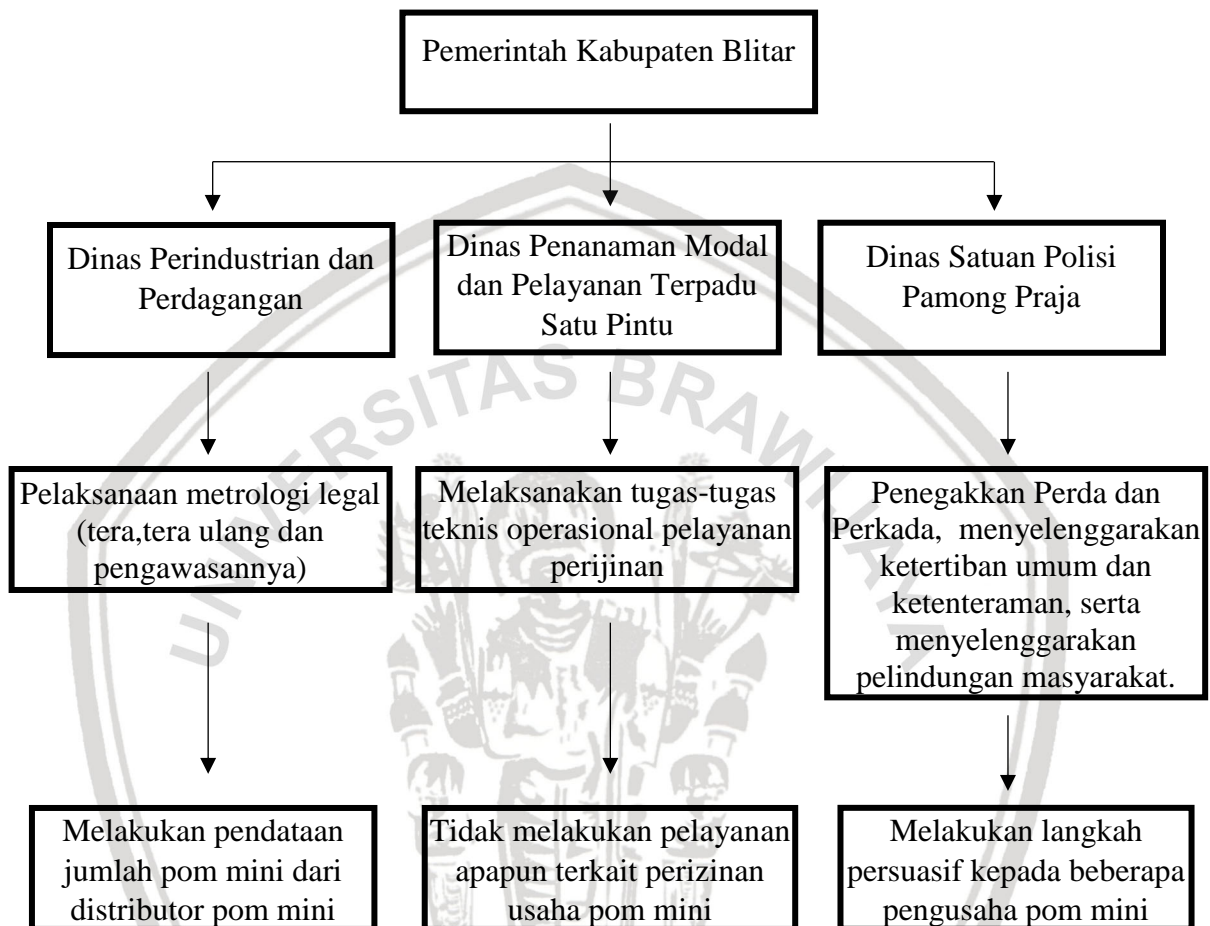
PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai Analisis Rasionalitas Tindakan Pemerintah Kabupaten Blitar Terhadap Ilegalitas Usaha Pom Mini di Kabupaten Blitar. Proses menganalisis menggunakan teori pilihan rasional yang ditemukan oleh James S. Coleman. Menurut penjelasan Coleman terhadap pilihan rasional memiliki dua indikator penting, yaitu aktor dan sumber daya. Dalam bab pembahasan ini akan terdapat beberapa sub bab, yaitu aktor dan sumber daya dan rasionalitas tindakan Pemerintah Kabupaten Blitar terhadap ilegalitas usaha pom mini.

5.1. Aktor dan Sumber Daya

Aktor dan sumber daya sangat mempengaruhi berbagai macam tindakan dan pilihan perihal permasalahan ilegalitas pom mini. Bermunculannya usaha pom mini tidak terlepas dari berbagai macam faktor yang didalamnya dipengaruhi oleh aktor dan sumber daya. Aktor yang terlibat dari maraknya ilegalitas usaha pom mini lebih dikerucutkan lagi kepada Pemerintah Kabupaten Blitar. Aktor dari pemerintah dapat dikerucutkan kembali berdasarkan permasalahan ilegalitas pom mini, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja. Dinas-dinas tersebut memiliki kontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap semakin maraknya usaha pom mini di Kabupaten Blitar.

Bagan 5.1
Pemetaan Aktor Pemerintah Kabupaten Blitar



Sumber: Data Olahan Penulis, 2018

Sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah berupa kewenangan dan kekuasaan yang sebelumnya telah diatur dalam peraturan ataupun perundang-undangan. Selain itu juga berupa peraturan atau undang-undang yang telah dilanggar oleh adanya usaha atau bisnis pom mini. Sumber daya yang lain dapat berupa uang atau dana sebagai pendukung terlaksananya kegiatan pemerintah. Bagan tersebut menggambarkan pemetaan aktor, kewenangan para aktor dan tindakannya berdasarkan permasalahan ilegalitas pom mini. Setiap aktor memiliki

kewenangan yang berbeda sehingga memiliki tindakan yang berbeda pula dengan yang lain.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa pelaksanaan metrologi legal berupa tera atau tera ulang sekaligus pengawasannya telah dilimpahkan kepada kota atau kabupaten. Metrologi legal di Kabupaten Blitar menjadi wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Maka dari itu, pom mini yang menggunakan alat ukur tidak SNI dan tidak memiliki izin resmi menjadi permasalahan langsung untuk dinas tersebut, mengingat salah satu kewenangannya adalah melakukan pengawasan. Dalam menjalankan kewenangan pengawasan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pengawasan Metrologi Legal sebagai langkah untuk menanggapi pelimpahan wewenang yang telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Tindakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar saat ini adalah melakukan pendataan terhadap jumlah pom mini dengan mengunjungi distributor pom mini di Kabupaten Blitar.⁴⁷ Pendataan tersebut tentu tidak dapat berjalan dengan maksimal karena Disperindag tidak melakukan pendataan langsung dilapangan. Mengetahui jumlah keseluruhan pengusaha pom mini bersifat penting karena menjadi dasar tindakan pemerintah selanjutnya. Jumlah pom mini

⁴⁷ Berdasarkan wawancara penulis dengan Purwanto selaku Kepala Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar pada tanggal 24 September 2018 pukul 15.54 WIB.

akan berguna sebagai data untuk melakukan pembinaan atau sosialisasi untuk kegiatan mendatang. Disperindag Kabupaten Blitar juga telah menerima surat edaran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang ditujukan kepada para pengusaha pom mini. Surat edaran tersebut menyatakan bahwa pengusaha pom mini tidak boleh menggunakan pompa ukur BBM yang tidak bertanda tera sah yang berlaku karena melanggar peraturan perundang-undangan.⁴⁸ Menyikapi surat edaran tersebut Disperindag Kabupaten Blitar telah menyampaikannya kepada distributor pom mini bukan kepada pengusaha pom mini secara langsung. Tentu saja hal tersebut tidak menjamin distributor pom mini akan menyampaikannya kepada seluruh pengusaha pom mini di Kabupaten Blitar karena akan berdampak juga terhadap keberlangsungan usaha distribusi alat pom mini. Distributor pom mini juga tidak memiliki kepentingan atau keuntungan tertentu apabila menyampaikan surat edaran tersebut. Pada akhirnya surat edaran tersebut tidak sampai kepada para pengusaha pom mini.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas teknis operasional pelayanan perijinan. Dapat dikatakan dinas ini memiliki kewenangan untuk memberikan atau menerbitkan izin usaha apabila usaha tersebut sesuai dengan persyaratan pembuatan izin. Pelaku usaha pom mini atau penjual BBM eceran dengan pom mini memerlukan surat izin usaha perdagangan agar dapat diakui dan dapat dipertanggungjawabkan apa yang akan dijual nantinya namun alat pom mini

⁴⁸ Surat Edaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Nomor 510/1850/118-08/2016 Perihal Pompa Ukur Pertamina

tidak memiliki tanda izin pabrik dan tidak terdapat tanda tera atau tera ulang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan sehingga tidak dapat dibuatkan surat izin usaha perdagangan. Dinas bukan tidak mau memberikan izin, jikalau memang usaha pom mini memiliki aturan yang mmperjelas keberadaannya dinas selaku sebagai pelayan publik akan memberikan izin. Dapat dikatakan bahwa keterlibatan DPMPTSP terhadap kasus maraknya pom mini sebagai aktor yang tidak secara langsung terlibat.

Dinas Satuan Pamong Praja Kabupaten Blitar sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah, memiliki kewenangan dalam menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Usaha pom mini tidak diatur dalam perda ataupun perkada sehingga tidak dapat ditindak oleh pihak satpol pp namun apabila usaha atau bisnis pom mini telah melakukan pelanggaran ketertiban dan membuat masyarakat resah dengan keberadaannya Dinas Satpol PP dapat melakukan penindakan dengan dasar undang-undang tersebut.

Hingga saat ini belum ada masyarakat yang merasa terganggu atau merasa dirugikan dengan keberadaan usaha pom mini dan memberikan laporan kepada pemerintah. Atas latar belakang tersebut pihak Dinas Satuan Polisi Pamong Praja melakukan langkah persuasif kepada para pelaku usaha pom mini. Langkah persuasif ini dilakukan di beberapa pelaku usaha pom mini dan tidak menyeluruh hanya pada lingkup kecil saja.⁴⁹ Dari ketiga dinas tersebut tidak bisa secara sendiri-

⁴⁹ Berdasarkan wawancara penulis dengan Ruslan selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Kabupaten Blitar pada tanggal 11 Oktober 2018 pukul 10.35 WIB

sendiri melakukan penyelesaian permasalahan usaha pom mini. Koordinasi dari ketiga dinas sangatlah dibutuhkan. Dinas Satpol PP tidak dapat melakukan penindakan terhadap pengusaha pom mini tanpa adanya pendampingan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pihak Pertamina yang memiliki izin resmi dalam melakukan kegiatan niaga bahan bakar minyak tidak dapat melakukan tindakan secara langsung perihal permasalahan ilegalitas pom mini. Memang para pengusaha pom mini membeli bahan bakar minyak dari SPBU milik Pertamina namun pihaknya sendiri hanya melakukan jual beli selayaknya sama seperti dengan konsumen yang lainnya. Tidak ada kerjasama apapun antara pom mini dengan pihak Pertamina. Pertamina memiliki tugas untuk melaksanakan penyediaan dan pelayanan bahan bakar minyak untuk keperluan dalam negeri.⁵⁰ Pertamina tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan ataupun pengawasan terhadap permasalahan ilegalitas pom mini. Pihak Pertamina hanya dapat melakukan tindakan persuasif yaitu dengan melakukan himbauan kepada kepala daerah bahwa alat yang digunakan oleh pom mini kualitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak dilakukan pengujian, harga yang tidak memiliki standart, dan pengukuran yang dapat diubah-ubah.⁵¹ Demi meminimalisir tingkat bahaya dalam penjualan bahan bakar minyak melalui jurigen, pihak SPBU Pertamina saat ini tidak memperbolehkan lagi melakukan pembelian BBM dengan menggunakan jurigen berbahan plastik atau sejenisnya

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

⁵¹ <https://www.liputan6.com/otomotif/read/3406793/cara-pertamina-mengurangi-pertamini-ampuh-tidak> diakses pada tanggal 25 Desember 2018, pukul 20.33 WIB.

dan harus menggunakan jurigen atau drum dari bahan alumunium atau dari bahan kaleng.

5.2. Rasionalitas Tindakan Pemerintah Kabupaten Blitar Terhadap Illegalitas Usaha Pom Mini

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa kegiatan metrologi legal berupa tera dan tera ulang beserta dengan pengawasannya menjadi kewenangan daerah kota atau kabupaten. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar tidak melakukan kegiatan tera ataupun tera ulang karena para pemilik usaha pom mini tidak memiliki izin tanda pabrik ataupun izin tipe pada alat pom mini. Izin tipe diperoleh apabila alat ukur merupakan barang impor dari luar negeri. Sedangkan izin tanda pabrik didapatkan apabila alat ukur diproduksi didalam negeri. Izin tanda pabrik tersebut dikeluarkan oleh Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan yang berada di Bandung.

“syarat kita bisa melayani alat ukur atau UTTP termasuk pom mini atau timbangan itu, pertama kalau impor dia harus punya izin tipe, dilengkapi label kuning, ...sedangkan kalau barangnya itu diproduksi dalam negeri itu harus ada izin tanda pabrik, itu yang dikeluarkan oleh Direktorat Metrologi Bandung kementerian perdagangan”⁵²

Salah satu produsen atau pembuat pom mini pernah melakukan uji untuk mendapatkan izin tanda pabrik di Direktorat Metrologi Bandung namun tidak lolos karena tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan syarat teknis. Alat pom mini memang kenyataannya memiliki kualitas bahan dan alat jauh dibawah kualitas pom

⁵² Berdasarkan wawancara penulis dengan Sugeng Hariyanto selaku Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar pada tanggal 26 September 2018 pukul 11.10 WIB.

di SPBU. Hal tersebut dilakukan untuk memangkas harga jual pom mini agar lebih terjangkau dan laku di kalangan masyarakat menengah kebawah. Tentu masyarakat tidak dapat menjangkau harga pom yang memiliki kualitas yang sama di SPBU. Jumlah pengusaha pom mini tidak akan sebanyak saat ini apabila pom mini dihargai dengan sangat mahal.

Tindakan yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar hingga saat ini berupa pendataan terhadap jumlah pom mini di Kabupaten Blitar dengan cara mengunjungi salah satu distributor pom mini di Kabupaten Blitar. Jadi bukan pendataan yang melakukan survei secara langsung dilapangan. Sehingga pemerintah tidak memiliki data secara pasti berapa jumlah pengusaha pom mini di Kabupaten Blitar. Seharusnya hal tersebut harus dilakukan mengingat kewenangan pemerintah dalam pengawasan tersebut. Namun dalam kenyataannya pendataan jumlah pom mini tidak serta merta dapat langsung dilakukan karena belum adanya dana yang mendukung kegiatan tersebut. Tidak adanya dana tersebut menandakan bahwa pemerintah tidak melakukan perencanaan atau penganggaran dana untuk melakukan kegiatan berkaitan dengan ilegalitas pom mini pada tahun sebelumnya atau tahun 2017. Pada akhirnya ilegalitas pom mini tetap terjadi dan semakin marak pada tahun 2018 sekarang.

Banyak hal yang harus diketahui oleh pemerintah terkait dengan harus diadakannya pengawasan langsung terhadap pom mini. Salah satunya mengenai kegiatan tera atau tera ulang. Ilegalnya pom mini membuat pemerintah tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan tersebut sehingga pemilik usaha pom

mini sendiri yang harus melakukan kegiatan tera.⁵³ Alat ukur digital didalam pom mini memiliki kualitas yang buruk dibandingkan dengan yang ada di SPBU resmi. Alat ukur tersebut memiliki tingkat akurat yang sangat rendah dan sering berubah-ubah dengan sendirinya. Hal tersebut membuat pemilik pom mini harus melakukan tera ulang setiap beberapa waktu sekali untuk mengembalikan ukuran menjadi akurat kembali. Tingkat keakuratan pom mini yang sering berubah-ubah dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen bahan bakar minyak.

“...rajin mengecek tera ulang 2 minggu atau 1 bulan, akurasinya, akurat ya akurat sih cuma sering mengecek kalo tidak , suatu saat tidak dicek katakanlah hampir satu bulan ternyata kurang , satu liter saja dituangkan tidak satu liter , jadi akurasinya, makanya harus sering sering tera ulang.”⁵⁴

Kebanyakan lokasi usaha pom mini berada di pemukiman warga dan tidak memiliki tingkat keamanan yang memadai. Pom mini bisa meledak kapan saja, hal tersebut dikarenakan tidak diketahuinya berapa lama masa alat pom mini dapat digunakan. Penyimpanan bahan bakar yang tidak ditanam juga turut menambah faktor pendukung pom mini dapat meledak kapan saja. Percikan api dapat dengan mudah menyulut terjadinya kebakaran. Kerugian tentu saja tidak hanya pemilik usaha pom mini melainkan juga warga lain yang tinggal berdempetan dengan usaha tersebut. Sehingga pemerintah harus cepat melakukan pengawasan maupun tindakan yang tepat terkait maraknya kegiatan usaha pom mini di Kabupaten Blitar. Pengawasan yang tidak dilakukan dengan semestinya akan memberburuk keadaan usaha ini. Pelaku usaha akan semakin leluasa menjalankan usahanya. Dampak

⁵³ Berdasarkan wawancara penulis dengan Rudi Wibowo selaku pemilik usaha pom mini pada tanggal 31 Oktober pukul 16.52 WIB

⁵⁴ Berdasarkan wawancara penulis dengan Rudi Wibowo selaku pemilik usaha pom mini pada tanggal 31 Oktober pukul 16.52 WIB.

buruknya pelaku usaha juga akan semakin mudah melakukan tindak kecurangan seperti mengubah-ubah harga dan takaran liter BBM atau mencampur bahan bakar minyak dengan bahan lain sehingga kualitas bahan bakar yang dijual tidak memiliki kualitas yang pada semestinya. Parahnya apabila pelaku usaha menaikkan harga dan menurunkan ukuran liter sehingga BBM yang dikeluarkan satu liter tidak semestinya satu liter.

Pelayanan pemberian izin usaha berada di tangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar. Para pelaku usaha pom mini memiliki minat yang cukup tinggi untuk mendaftarkan usahanya di dinas tersebut. Pengusaha pom mini ingin diakui usahanya dan menjadi legal dimata hukum. Namun pengajuan tersebut ditolak oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar karena memang tidak ada dasar aturannya dan usaha tersebut telah melanggar peraturan. Dinas terkait hanya bisa memberikan izin mendirikan bangunan dan bukan memberikan izin menjalankan usaha apapun. Tidak pasti berapa pelaku usaha yang datang ke dinas tersebut karena pengusaha pom mini langsung ditolak saat hendak mengajukan izin sehingga tidak terekam berapa jumlah pelaku usaha yang telah datang. Sebagian pelaku usaha pun tidak tahu harus melakukan perizinan kepada siapa. Sebagian melakukan perizinan ke Polsek setempat untuk memberitahukan bahwa dia membuka usaha pom mini. Sebagian lagi hanya meminta izin kepada ketua RT dan RW perihal usahanya, izin tersebut lebih bersifat sekedar pemberitahuan saja daripada dikatakan perizinan karena tidak ada surat tertulis mengenai perizinan apapun.

Para pelaku usaha pom mini dapat dikenakan sanksi atas usaha yang telah melanggar aturan tersebut. Salah satunya adalah usaha niaga minyak dan gas bumi haruslah berbentuk badan usaha dan mendapatkan izin usaha dari pihak pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, apabila hal tersebut dilanggar para pelaku pom mini dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama tiga tahun dan menndapatkan denda paling banyak sejumlah Rp30.000.000.000,00. Selain itu alat ukur yang dimiliki pom mini tidak standart dan tidak bertanda tera sah, oleh karena itu pelaku usaha dapat dikenakan sanksi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tnetang Metrologi Legal bahwa pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pidana penajara paling lama selama satu tahun dan mendapatkan denda maksimal Rp. 1000.000,00. Pengakuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar bahwa pihaknya tidak dapat melakukan penindakan terhadap kasus ilegalitas pom mini. hal tersebut dikarenakan pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penindakan kasus ilegalitas pom mini. Seperti pernyataan oleh Sugeng Hariyanto Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar mengenai kewenangan dalam penindakan kasus ilegalitas pom mini;

“apa ya itu sudah masuk kewenangan tingkat satu sebenarnya itu , bisa pusat atau paling rendah itu tingkat satu PK perlindungan konsumen, konsumen itu dirugikan apa enggak,... memang ada hubungannya tapi

udah ada UPT di provinsi upt PK yang dimalang itu aris munandar (nama jalan) yang menanganinya itu.”⁵⁵

Hingga saat ini memang benar tidak adanya keluhan masyarakat yang dilaporkan ke pemerintah terkait jual beli bahan bakar minyak yang dilakukan dalam usaha pom mini. Dalam ilegalitas pom mini yang menjadi titik fokus adalah pom mini merupakan usaha yang masih ilegal karena menggunakan alat ukur yang tidak standart dan memiliki tingkat keamanan yang rendah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar merasa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan karena kewenangan mereka hanya sekedar melakukan pengawasan. UPT. Perlindungan Konsumen dalam hal ini lebih berfokus kepada masyarakat atau konsumen yang dirugikan oleh usaha pom mini tersebut. Provinsi tidak lagi memiliki kewenangan dalam hal metrologi legal karena menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah kewenangan tersebut telah diberikan atau dilimpahkan kepada Bupati atau Walikota yang pelaksanaannya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan di daerah. Sehingga jika terdapat laporan dari masyarakat perihal dirugikannya konsumen dari usaha pom mini maka UPT. Perlindungan Konsumen dapat langsung bergerak dengan fokus konsumennya bukan pom mini. Untuk permasalahan alat ukur pom mini yang tidak standart dan tidak memiliki tanda tera sah adalah wewenang pemerintah daerah kota atau kabupaten bersama dengan pusat.

⁵⁵ Berdasarkan wawancara penulis dengan Sugeng Hariyanto selaku Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar pada tanggal 26 September 2018 pukul 11.10 WIB.

Kegiatan penindakan yang hingga saat ini belum dilakukan memiliki faktor yang lainnya. Pemerintah melihat bahwa usaha pom mini dilakukan oleh masyarakat kecil untuk meningkatkan perekonomiannya. Hal ini juga disampaikan oleh Ruslan selaku Kepala Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;

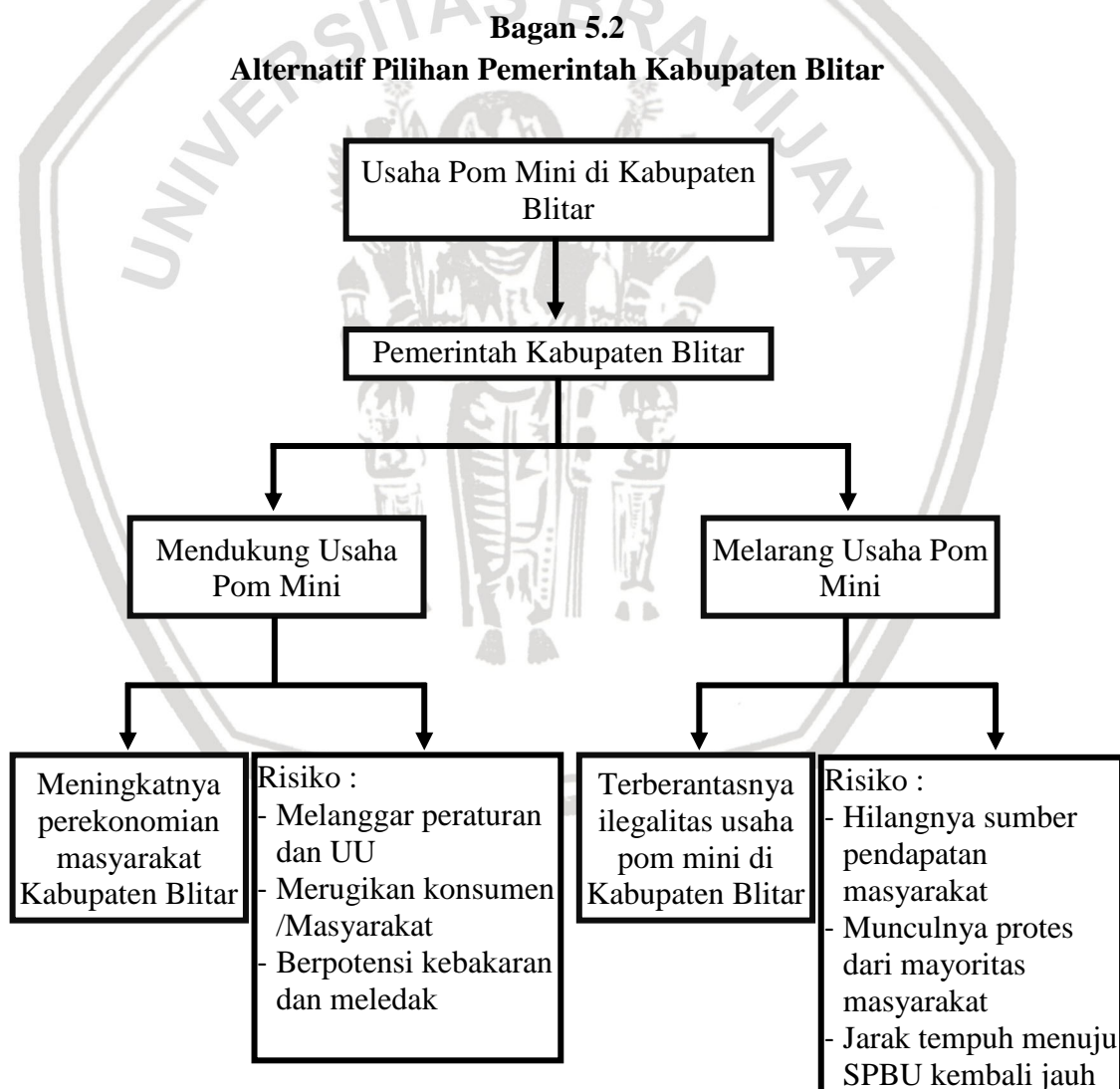
“...misalkan kalau sekarang kan disini kan izin ada di dinas ptsp, berarti yang tidak berizin itu kan dianggap ilegal gitu, bagaimana sikap satpol, idealnya kita, ini bahasa ideal tetep kita melaksanakan penegakan aturan cuma dengan adanya ya kita pertimbangan kondisi sosial masyarakat kita kan tidak sertamerta melakukan penindakan itu kita tetep koordinasi dengan perindag,”⁵⁶

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar mengaku dapat melakukan penindakan terhadap pengusaha pom mini karena usaha tersebut tidak memiliki izin. Namun ternyata hal tersebut tidak bisa secara langsung dilakukan karena pihak dinas masih mempertimbangkan aspek yang lain. Dinas juga mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, bahwa apabila dilakukan penindakan masyarakat akan kehilangan pekerjaannya. Namun jangan sampai dengan pertimbangan kondisi sosial tersebut pemerintah enggan untuk melakukan tindakan yang semestinya. Sehingga usaha pom mini terlalu lama dibiarkan dan apabila alat pom mini telah habis masa penggunaannya dan tetap dipaksa untuk berjualan kemudian terjadi kecelakaan kerja yang pada akhirnya masyarakat juga akan kehilangan pekerjaan

⁵⁶ Berdasarkan wawancara penulis dengan Ruslan selaku Kepala Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar pada tanggal 11 Oktober 2018 pukul 10.35 WIB.

sehingga satpol pp hingga saat ini melakukan langkah persuasif kepada sebagian para pelaku usaha pom mini.

Pemerintah memiliki beberapa alternatif pilihan untuk menentukan tindakan apa yang harus diambil. Alternatif pilihan tersebut dapat dikerucutkan menjadi dua, yaitu mendukung atau melarang usaha pom mini. Setiap alternatif pilihan tersebut memiliki tujuan dan risiko yang berbeda. Lebih jelasnya alternatif pilihan tersebut dapat dilihat pada bagan tersebut:



Sumber: Data Olahan Penulis, 2018

Tujuan dari Pemerintah Kabupaten Blitar adalah memajukan dan mengembangkan usaha perekonomian masyarakat melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan dan sebagainya. . Usaha pom mini yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Blitar merupakan bentuk dari ekonomi kerakyatan yang berbasis ekonomi kreatif dan jiwa kewirausahaan. Hal tersebut sesuai dengan misi pembangunan Kabupaten Blitar namun kegiatan usaha pom mini melanggar ketentuan yang ada membuat pemerintah kesulitan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Secara tidak langsung pemerintah tidak ingin masyarakat kehilangan pekerjaan mereka karena akan menurunkan perekonomian Kabupaten Blitar.

Rasionalitas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Blitar bahwa kegiatan usaha pom mini mayoritas dilakukan oleh masyarakat kecil atau masyarakat golongan menengah kebawah. Jika kegiatan usaha pom mini dihilangkan akan berdampak pada sumber pendapatan masyarakat tersebut sehingga semakin menyulitkan terlaksananya tujuan yang telah dibuat sebelumnya. Hilangnya pekerjaan masyarakat akan berdampak pula terhadap semakin meningkatnya jumlah pengangguran di Kabupaten Blitar. Selain itu, usaha pom mini yang telah marak jumlahnya semakin menyulitkan pemerintah dalam hal pengawasan maupun penindakan. Kegiatan penindakan atau penyegelan usaha pom mini justru akan memunculkan protes yang besar dari masyarakat karena jumlah pengusaha pom mini yang telah banyak sehingga memperkuat jalinan relasi diantara mereka untuk menuntut pemerintah. Masyarakat pasti akan menuntut adanya solusi dari

pemerintah sebagai pengganti menghilangnya pekerjaan atau sumber pendapatan mereka. Usaha pom mini di Kabupaten Blitar selama ini belum muncul adanya keluhan dari masyarakat sehingga pom mini dianggap membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak.

Risiko Pemerintah Kabupaten Blitar jika mendukung kegiatan usaha pom mini yaitu berhadapan langsung dengan undang-undang atau peraturan yang telah dilanggar oleh kegiatan usaha pom mini tersebut. Usaha pom mini akan tetap ilegal apabila tidak ada kejelasan regulasi yang mengatur keberadaan usaha pom mini karena pengusaha pom mini akan tetap menggunakan perlengkapan atau alat ukur yang tidak standart. Pemerintah membutuhkan kerja yang lebih banyak dan memiliki strategi yang tepat untuk merealisasikan usaha pom mini menjadi legal. Pencarian bahan perlengkapan pom mini yang standart dapat disesuaikan dengan lingkungan usaha pom mini dan kemampuan mayoritas pengusaha pom mini, mengingat pengusaha pom mini mayoritas masyarakat kecil. Jangan sampai masyarakat tidak mampu membeli yang pada akhirnya masyarakat tetap memilih menggunakan alat yang lebih murah meski bahan atau perlengkapan tersebut tidak standart.

Pemilihan bahan perlengkapan usaha pom mini yang berkualitas dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pom mini yang meledak atau terbakar. Pom mini yang meledak telah terjadi beberapa kali di daerah-daerah lain. Salah satunya berada di daerah Sumenep, pom mini meledak dikarenakan adanya konsleting arus listrik dari pompa yang digunakan untuk menyalurkan bahan bakar minyak dari tangki drum penyimpanan bahan bakar minyak ke mesin dispenser pengisian

BBM.⁵⁷ Percikan api yang dihasilkan oleh konsleting arus listrik menyambar bahan bakar minyak dari pompa penyalur. Api merambat pada penyimpanan BBM yang terletak didekat pom mini dan meledakkan pom mini beserta dengan toko pemilik pengusaha pom mini. Kabupaten Blitar sendiri masih belum ada pom mini yang meledak atau terbakar namun tidak menutup kemungkinan hal tersebut dapat terjadi karena saat ini pengusaha pom mini masih menggunakan peralatan yang tidak standart.

Pemerintah membutuhkan banyak informasi dalam menentukan sikap terhadap permasalahan ilegalitas pom mini. Hal ini penting karena semakin banyak informasi yang terkumpul langkah pemerintah akan semakin mudah dan jelas. Melakukan pendataan secara menyeluruh dapat menjadi cara untuk mengumpulkan informasi bagi Pemerintah Kabupaten Blitar terlepas mendukung ataupun melarang usaha pom mini. Proses pendataan tersebut dapat dibantu oleh kelurahan atau desa agar lebih memudahkan dan memaksimalkan hasil pendataan. Hasil dari pendataan tersebut dapat dijadikan data bagi pemerintah untuk melakukan tindakan selanjutnya. Proses pengumpulan informasi dapat juga dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan dinas terkait permasalahan ini dan mendiskusikan hal ini dengan pemerintah pusat untuk membahas ketentuan yang harus dipenuhi oleh pengusaha pom mini.

⁵⁷ <http://surabaya.tribunnews.com/2018/05/29/pom-mini-meledak-dan-terbakar-di-sumenep-hanguskan-ruko-dan-gudang-milik-sekretaris-desa-ini> diakses pada tanggal 25 Desember 2018, pukul 21.16 WIB.

Para pelaku usaha pom mini setidaknya telah mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Jika pemerintah mendukung keberadaan pom mini, pembinaan atau sosialisasi yang diberikan adalah pengetahuan atau wawasan bagaimana melakukan usaha pom mini yang baik dan benar. Pemerintah dapat menetapkan standart keamanan pom mini yang layak untuk dipergunakan bagi pelaku usaha. Tidak hanya itu masyarakat juga membutuhkan pengetahuan dan wawasan terhadap keselamatan kerja dan kemampuan dalam pemadaman kebakaran mengingat lokasi usaha kebanyakan berada di lingkungan padat penduduk. Penataan usaha pom mini juga diperlukan untuk menghindari lokasi usaha pom mini yang berdempetan dengan pemukiman warga. Pembinaan ini selain berdampak pada pengusaha pom mini juga untuk menghindari kerugian masyarakat sebagai konsumen dari potensi meledaknya atau terbakarnya pom mini.

Pemerintah dapat pula melarang keberadaan pom mini meskipun hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan masyarakat atau pelaku usaha, timbulnya protes dari mayoritas pengusaha pom mini dan jarak tempuh masyarakat membeli BBM kembali jauh. Hasil dari pelarangan ini tentu terbebasnya Kabupaten Blitar dari ilegalitas usaha masyarakat sehingga masyarakat dapat langsung membeli BBM eceran di SPBU resmi dan kemungkinan kerugian konsumen menjadi sangat minim. Sesuai dengan Surat Edaran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur bahwa Disperindag Kabupaten Blitar hendaknya melakukan pembinaan kepada pemilik/ pemakai dan

produsen/ distributor pertamini serta melakukan pengawasan terpadu secara persuasif.⁵⁸

Sebelum melaksanakan pelarangan usaha pom mini pemerintah juga melaksanakan pembinaan terlebih dahulu. Pembinaan ini lebih pada langkah persuasif agar para pelaku usaha pom mini tidak menggunakan alat ukur yang tidak memiliki tanda tera sah, dengan kata lain masyarakat tidak boleh menggunakan alat pom mini untuk melakukan usaha perdagangan karena alat tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha pom mini dapat diberitahu dampak negatif dari usaha pom mini tersebut, mulai dari alat ukur yang melanggar aturan hingga pada aspek keamanan dan keselamatan kerja. Selain itu, Pemerintah juga cepat menyampaikan surat edaran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur langsung kepada pelaku usaha pom mini agar lebih mengetahui sanksi yang akan diterima apabila tetap melakukan usaha pom mini.

Kedua alternatif pilihan tersebut memang sama-sama memiliki risiko dan hasil atau tujuan yang dicapai, tetapi ada sebuah kecondongan pilihan mana yang memiliki tingkat preferensi tertinggi. Pilihan pertama, pemerintah mendukung adanya usaha pom mini dan terselenggaranya perkembangan perekonomian masyarakat namun pemerintah tidak mungkin mendukung sesuatu yang ilegal atau atau melanggar peraturan. Meskipun hasil capaiannya nanti akan lebih besar karena banyak pihak yang akan diuntungkan, tetapi proses menuju legalnya usaha pom mini akan memakan waktu yang panjang karena perlu adanya pengkajian terhadap

⁵⁸ Surat Edaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Nomor 530/3347/125.1/2017 Perihal Pompa Ukur Pertamina

permasalahan tersebut. Bahkan hingga sampai saat ini pemerintah pun belum memiliki solusi perihal permasalahan ilegalitas usaha pom mini. Permasalahan pom mini merupakan permasalahan dengan skala yang luas karena tidak hanya terjadi pada satu atau dua daerah saja, melainkan hampir semua daerah memiliki permasalahan yang sama. Keikutsertaan daerah lain terutama pemerintah pusat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan pom mini ini.

Pelarangan terhadap usaha pom mini dirasa lebih rasional daripada melakukan dukungan terhadap usaha pom mini. Hal ini dikarenakan keseluruhan alat pom yang dimiliki para pelaku usaha seluruhnya tidak standart atau tidak diketahui seperti apa kualitasnya. Usaha inipun telah melanggar peraturan yang ada. Sekalipun pemerintah membuat peraturan dalam rangka melegalkan usaha pom mini, pasti akan mensyaratkan pelaku usaha untuk menggunakan peralatan dan perlengkapan yang standart dan melakukan proses perizinan. Telah diketahui bahwa peralatan yang standart tidaklah murah dan sulit dijangkau oleh masyarakat. Kemungkinan akan semakin rinci pula persyaratan yang harus dipenuhi apabila telah ada peraturan perihal pom mini, seperti penataan lokasi, harga jual, proses perizinan dan sebagainya. Letak yang saat ini digunakan untuk melakukan usaha pom mini kebanyakan ada di lingkungan padat penduduk yang pastinya akan menjadi tempat yang dilarang untuk melakukan usaha pom mini. Meskipun telah dibuatnya peraturan resmi mengenai legalnya usaha pom mini tetapi apabila persyaratan melakukan usaha pom mini sulit dijangkau oleh masyarakat maka tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat akan tetap melakukan usaha pom mini dengan cara melanggar ketentuan tersebut. Masyarakat akan lebih memilih hal yang

paling banyak menguntungkan bagi dirinya sendiri sehingga ilegalitas usaha pom mini akan terjadi kembali. Maka dari itu, melakukan pelarangan secepatnya menjadi salah satu langkah bagi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan pom mini sebelum munculnya dampak negatif dari usaha tersebut.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang mengatur mengenai pelimpahan wewenang tersebut memang tidak secara rinci dijelaskan seperti apa bentuk pengawasan yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Namun hal tersebut telah dijelaskan lebih rinci di peraturan yang lain mengenai pengawasan metrologi legal. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pengawasan Metrologi Legal yang lebih mengatur dengan jelas bagaimana bentuk pengawasan dan hal yang harus dilakukan pemerintah kota atau kabupaten apabila menemui penggunaan alat ukur yang tidak memiliki tanda tera sah atau tidak standar. Dari Peraturan Menteri Perdagangan tersebut dapat dilihat bahwa kota/kabupaten benar dalam hal ini memiliki kewenangan dalam hal penindakan terhadap kasus ilegalitas pom mini yang semakin marak di lingkungan Kabupaten Blitar.

Lebih jelasnya, jika pemerintah selama melakukan pengawasan tersebut menemukan sebuah pelanggaran langkah selanjutnya yang harus dilakukan pemerintah tertuang pada pasal 20 Peraturan Menteri Perdagangan Republik

Indonesia Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pengawasan Metrologi Legal, yaitu,⁵⁹

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diduga terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Metrologi Legal, Pengawas Kemetrolagian dapat melakukan pengamanan terhadap barang yang dianggap sebagai bukti awal dan/atau lokasi atau tempat barang dimaksud.
- (2) Pengamanan terhadap barang yang dianggap sebagai bukti awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penutupan sementara menggunakan *Metrology Line* agar tidak terjadi perubahan terhadap barang dan/atau lokasi atau tempat barang dimaksud.
- (3) Pengamanan terhadap UTTP yang dianggap sebagai bukti awal, selain menggunakan *Metrology Line* dapat dilakukan penyegelan dengan membubuhkan Segel Metrologi.
- (4) Dalam hal barang yang diamankan merupakan barang bergerak atau dapat dipindahkan, terhadap barang tersebut diberikan Label Barang dalam Pengamanan.
- (5) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus dibuatkan berita acara dengan format tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Pengawas Kemetrolagian yang melakukan pengamanan terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam harus melaporkan tindakan pengamanan kepada Atasan Pengawas Kemetrolagian.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini juga telah diatur tindakan selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan yang nantinya akan dilakukan sebuah penyidikan. Pemerintah kota atau kabupaten memiliki dasar yang jelas apabila ingin melakukan penindakan terhadap kasus ilegalitas pom mini ini. Memang belum ada peraturan mengenai pom mini tetapi pelanggaran yang telah dilakukan oleh pom mini sudah diatur dengan jelas dan proses penindakannya juga telah diatur dengan rinci.

⁵⁹ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/M-DAG/PER/5/ 2017 Tentang Pengawasan Metrologi Legal

Apabila dalam hasil pengawasan terbukti terdapat adanya tindak pidana dan didukung beberapa bukti maka Atasan Pengawas Kemetrolagian harus membuat dan menerbitkan surat perintah penyidikan dalam jangka waktu dua kali dua puluh empat jam. Setelah surat tersebut diterbitkan maka pihaknya dapat langsung melakukan penyidikan. Penyidikan dilakukan oleh pengawas kemetrolagian yang telah ditunjuk sebelumnya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Namun jika pengawas kemetrolagian daerah belum mampu melakukan penyidikan tersebut, Kepala Dinas memiliki wewenang untuk meminta bantuan kepada Pengawas Kemetrolagian Direktorat Metrologi atau meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membantu melakukan penyidikan. Jikalau memang usaha pom mini membahayakan keselamatan pelaku usaha maupun masyarakat langkah tersebut harus segera diambil pemerintah untuk menghindari korban dan kerugian yang lainnya. Selain itu, semakin lama pemerintah tidak segera melakukan tindakan terhadap usaha pom mini akan semakin bertambah lagi pelaku usaha tersebut sehingga saat dilakukan penindakan akan tambah merepotkan bagi pemerintah dan masyarakat yang dirugikan akan semakin bertambah pula. Menurut pengakuan distributor pertamini yang telah lama melakukan bisnis ini jumlah pom mini di Kabupaten Blitar diperkirakan telah menyentuh angka 400 hingga 500 pom mini, jumlah yang sangat banyak dan memiliki potensi untuk semakin bertambah lagi.

Masyarakat sebagai pelaku usaha pom mini tentu akan memberikan penolakan apabila pemerintah melakukan penindakan tanpa memberikan solusi yang tepat bagi para pelaku usaha. Para pelaku usaha pom mini pasca dilakukannya

penindakan tentu akan melakukan unjuk rasa terkait terancamnya pekerjaan mereka. Maka sebelum dilakukannya penindakan akan lebih baik apabila dilaksanakan terlebih dahulu pembinaan atau sosialisasi kepada pelaku usaha pom mini sehingga dapat dibuat terlebih dahulu bagaimana regulasi yang benar untuk memulai pembinaan atau sosialisasi tersebut. Pemerintah Kabupaten Blitar dapat segera melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk membicarakan regulasi yang tepat. Selain itu pemerintah juga perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat atau Direktorat Kemetrologian terkait regulasi atau langkah yang tepat mengingat pemerintah pusat memiliki kewenangan yang lebih tinggi dan memiliki cakupan kewenangan yang lebih luas.

Tidak ada tanda bahwa pemerintah berjalan pada salah satu alternatif pilihan, yaitu mendukung atau melarang kegiatan usaha pom mini di Kabupaten Blitar. Seperti yang diutarakan pemerintah bahwa tidak ditindaknya para pelaku usaha pom mini dengan alasan pemerintah memiliki keinginan untuk memajukan perekonomian daerah dan pom mini merupakan kegiatan usaha milik rakyat kecil tidak diikuti dengan langkah penyelesaian. Tidak ditindaknya usaha pom mini apapun alasannya bila pemerintah juga kurang maksimal dalam melakukan pencarian solusi dari permasalahan ini kegiatan ini tetap menjadi usaha yang ilegal. Pemerintah pun tidak melakukan upaya dukungan terhadap kegiatan usaha pom mini. Dapat dikatakan bahwa munculnya usaha pom mini ini membuat pemerintah kebingungan antara tetap memajukan perekonomian atau memberantas kegiatan usaha yang ilegal tersebut. Meskipun memajukan perekonomian tidak harus dengan

adanya usaha pom mini namun para pelaku usaha ini sudah semakin banyak dan memiliki pengaruh terhadap sumber pendapatan masyarakat.

Kegiatan pelarangan usaha pom mini di Kabupaten Blitar juga masih belum konsisten dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut terlihat ketika Disperindag menyampaikan surat edaran dari Disperindag Jawa Timur yang diperuntukan untuk pelaku usaha pom mini tetapi hanya disampaikan pada distributor pom mini. Selain itu, penyampaian himbauan ilegalitas pom mini yang dilakukan oleh Dinas Satpol PP hanya sebagian kecil saja dari keseluruhan pelaku usaha pom mini tidaklah efektif untuk menurunkan angka pelaku usaha pom mini. Pemerintah tidak memiliki dana untuk menindaklanjuti permasalahan pom mini yang menandakan bahwa pemerintah tidak melakukan perencanaan atau penganggaran pada tahun sebelumnya. Pengawasan yang dilakukan pemerintah juga masih belum jelas seperti apa bentuk pengawasan yang telah dilakukan. Pengawasan terpadu secara persuasif yang sesuai dengan amanat didalam surat edaran dari Disperindag Jawa Timur masih belum dilaksanakan dengan maksimal karena Disperindag Kabupaten Blitar hanya menemui distributor saja dan belum sampai pada pelaku usaha pom mini.

Rentetan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah hingga sejauh ini masih menelantarkan permasalahan ilegalitas usaha pom mini. Hal terserbut dapat dikatakan bahwa pemerintah belum melaksanakan tugas semestinya sebagaimana wewenang yang dimiliki. Pemerintah telah mengetahui bahwa kegiatan usaha tersebut melanggar peraturan dan tidak memiliki peralatan atau perlengkapan yang layak sehingga tidak dapat diberikan izin dan uji tera. Mengetahui hal tersebut

pemerintah masih belum melakukan penindakan atau melakukan koordinasi dengan pemerintah tingkat atasnya perihal solusi dari permasalahan ilegalitas pom mini. Perihal pemerintah yang belum melakukan tindakan yang pasti ini bukan tanpa alasan, namun pemerintah belum memiliki solusi dari permasalahan pom mini. Belum tersedianya solusi yang tepat membuat pemerintah berpikir kembali ketika ingin melakukan penindakan karena akan memunculkan protes dikalangan masyarakat, apalagi jumlah pelaku usaha yang semakin marak.

Keberadaan usaha pom mini yang sampai saat ini belum ditindak oleh pemerintah memiliki dampak positif dan negatif yang lebih besar. Dampak positifnya perekonomian masyarakat akan semakin membaik. Banyak dari pelaku usaha pom mini yang memiliki jumlah pom lebih dari satu dan memiliki pegawainya sendiri. Adanya usaha pom mini tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan baru dikalangan masyarakat. Selain itu, akses masyarakat untuk mendapatkan bahan bakar minyak juga semakin cepat karena keberadaan pom mini yang ada dimana-mana. Dampak buruknya, masyarakat menjadi terbiasa melakukan kegiatan usaha yang melanggar peraturan dan kemungkinan terbentuknya usaha yang ilegal menjadi besar karena masyarakat menganggap pemerintah abai terhadap hal tersebut.

Keberadaan pom mini yang semakin marak akan berdampak pada ketersediaan bahan bakar minyak. Semakin banyak pelaku usaha semakin banyak yang melakukan penimbunan bahan bakar untuk kepentingan usaha pom mininya sendiri. Memang untuk premium dibatasi penjualannya karena merupakan bahan bakar minyak subsidi, namun untuk bahan bakar minyak seperti pertalite dan

pertamax tidak dibatasi jumlah pembeliaanya sehingga pelaku usaha pom mini dapat melakukan pembelian dengan jumlah yang banyak dan melakukan penimbunan. Selain itu tingkat bahaya dari usaha pom mini akan semakin tinggi karena pelaku usaha pom mini akan menjalankan usahanya sesuka hatinya tanpa memperhatikan keamanan dan kualitas dari alat pom mini. Hal tersebut dapat terjadi karena rendahnya pengawasan pemerintah terhadap usaha pom mini ini.



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Usaha pom mini di Kabupaten Blitar telah ada sejak tahun 2014 dan mulai marak pada sekitaran tahun 2016 hingga tahun ini. Kemunculan usaha pom mini yang biasa disebut dengan pertamini merupakan ide kreatif masyarakat dan merupakan bisnis baru yang memiliki potensi keuntungan yang besar. Namun usaha pom mini terkendala dengan proses perizinan karena alat ukur yang dimilikinya tidak layak untuk digunakan sehingga tidak dapat diberikan tanda izin pabrik sebagai salah satu syarat untuk bisa dilakukan tera dan tera ulang oleh pemerintah. Usaha pom mini rawan terhadap tindak kecurangan dan rawan terjadinya kebakaran. Karena pom mini merupakan hal baru, pemerintah kesulitan untuk menentukan sikap terhadap salah satu usaha kecil masyarakat ini.

Tindakan Pemerintah Kabupaten Blitar hingga saat ini berupa pendataan terhadap jumlah pom mini di Kabupaten Blitar dengan cara mengunjungi salah satu distributor pom mini dan belum adanya penindakan ataupun pembinaan secara langsung terhadap pemilik usaha pom mini. Selain itu, Disperindag Kabupaten Blitar telah menyampaikan surat edaran dari Disperindag Provinsi Jawa Timur namun hanya kepada distributor pom mini saja tidak kepada pengusaha pom mini secara langsung. Kewenangan dalam melakukan kegiatan metrologi legal berupa tera dan tera ulang beserta dengan pengawasannya merupakan hal baru bagi Kabupaten Blitar pasca adanya pelimpahan kewenangan dari provinsi kepada kota

atau kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Sehingga terjadi kesalahpahaman Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar terkait dengan kegiatan penindakan ilegalitas pom mini.

Pemerintah Kabupaten Blitar tidak berjalan pada tindakan mendukung atau melarang kegiatan usaha pom mini di Kabupaten Blitar. Seperti yang diutarakan pemerintah bahwa tidak ditindaknya para pelaku usaha pom mini dengan alasan pemerintah memiliki keinginan untuk memajukan perekonomian daerah tetapi pemerintah pun tidak melakukan upaya dukungan terhadap kegiatan usaha pom mini. Kegiatan pelarangan usaha pom mini di Kabupaten Blitar juga masih belum konsisten dilakukan oleh pemerintah. Pengawasan terpadu secara persuasif yang sesuai dengan amanat didalam surat edaran dari Disperindag Jawa Timur masih belum dilaksanakan dengan maksimal. Tindakan Pemerintah Kabupaten Blitar selama ini masih menelantarkan permasalahan ilegalitas usaha pom mini. Hal terserbut dapat dikatakan bahwa pemerintah melakukan pembiaran terhadap kegiatan usaha pom mini.

6.2. Rekomendasi

Rekomendasi berisikan tentang kritik dan saran dari peneliti terkait dengan hasil penelitian dilapangan selama proses penelitian skripsi. Dalam hal ini peneliti mempunyai rekomendasi untuk Pemerintah Kabupaten Blitar tentang tindakan pemerintah terhadap ilegalitas usaha pom mini di Kabupaten Blitar. Berdasarkan

hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan penawaran rekomendasi yang dapat menjadi alternatif pilihan dalam penyelesaian permasalahan, antara lain:

1. Melakukan pendataan secara langsung terhadap jumlah pom mini yang ada di Kabupaten Blitar. Pendataan dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak kelurahan agar proses pendataan dapat dilakukan dengan cepat dan lebih maksimal.
2. Pemerintah daerah harus segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat perihal langkah yang harus dilakukan terkait dengan maraknya usaha pom mini di Kabupaten Blitar
3. Melakukan penyusunan regulasi dengan pihak atau dinas terkait untuk melaksanakan pembinaan ataupun sosialisasi mengenai perizinan pom mini, dampak berbahaya alat pom mini, tingkat keselamatan kerja dan sebagainya. Pembinaan berfungsi untuk menambah wawasan pelaku usaha pom mini dan meminimalisir dampak berbahaya pom mini.
4. Pelaksanaan pengawasan memerlukan penambahan sumber daya manusia yang cukup untuk menghindari beban kerja yang besar dan terhambatnya proses pengawasan. Selain itu dibutuhkan sumber daya yang lain untuk mendukung keberlangsungan proses pengawasan seperti adanya dana pendukung.
5. Lebih ditingkatkan kembali pemahaman pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya dalam hal pengawasan. Pengawasan terhadap metrologi legal dapat mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik

Indonesia Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pengawasan Metrologi Legal.

6. Pemerintah harus tegas dalam menyikapi ilegalitas pom mini, apabila memang usaha ini membahayakan dan merugikan bagi masyarakat maka pemerintah harus melakukan penindakan terhadap usaha tersebut. Namun sebelum dilakukan penindakan atau penyegelan terhadap pom mini alangkah lebih baiknya dilakukan pembinaan atau sosialisasi terlebih dahulu.



Daftar Pustaka

Buku :

- Afrizal, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi, Rulam, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Coleman, James S, 2013, *Dasar-Dasar Teori Sosial Foundations of Social Theory*, Bandung: Nusa Media.
- Damsar, 2009, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Gunawan, Imam, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamdi. 2016. *Energi Terbarukan*, Jakarta: Kencana.
- Haryanto, Sindung, 2016, *Sosiologi ekonomi*, Yogyakarta Ar-Ruzz Media.
- Juliandi, Azuar, Irfan, dan Saprinah Manurung. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: UMSU Press.
- John T. Ishiyama dan Marijke Breuning, 2013, *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Kedua Puluh Satu: Sebuah Referensi Panduan Tematis Jilid Satu*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Miles dan Huberman .2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Noor, Juliansyah, 2011, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Prastowo, Andi, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
- Ritzer, George, 2014, *Teori Sosiologi Modern Edisi Ketujuh*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Widi, Restu K, 2010, *Asas Metodologi Penelitian (Sebuah Pengenalan Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wirawan, I.B, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Yusuf, Muri, 2014, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Internet :

<https://kumparan.com/@kumparanbisnis/ada-kelangkaan-premium-di-berbagai-daerah-bph-migas-tegur-pertamina> Diakses pada tanggal 14 Maret 2018, pukul 14.11 WIB

<https://www.liputan6.com/otomotif/read/3406793/cara-pertamina-mengurangi-pertamini-ampuh-tidak> diakses pada tanggal 25 Desember 2018, pukul 20.33 WIB.

<http://surabaya.tribunnews.com/2018/05/29/pom-mini-meledak-dan-terbakar-di-sumenep-hanguskan-ruko-dan-gudang-milik-sekretaris-desa-ini> diakses pada tanggal 25 Desember 2018, pukul 21.16 WIB.

Karya Ilmiah :

Ikhwan Nur Antyanto, 2014, *Analisis faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tenaga kerja Memilih Sektor Informal Sebagai Mata Pencarian (Studi Kasus Pada Pasar Penampungan Sementara Merjosari Malang)*, Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang

Muhammad Khaafidh, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Tenaga Kerja Untuk Berkerja di Kegiatan Pertanian*, Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang

Peraturan dan Dokumen:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, 2018, Kabupaten Blitar Dalam Angka 2018

Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, 2018, Statistik Daerah Kabupaten Blitar 2018

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No. 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pengawasan Metrologi Legal

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang Perlengkapannya

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Surat Edaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Nomor 530/3347/125.1/2017 Perihal Pompa Ukur Pertamina

Surat Edaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Nomor 510/1850/118-08/2016 Perihal Pompa Ukur Pertamina

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Wawancara :

Berdasarkan wawancara penulis dengan Dadik Setiyo Wahyudi selaku Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia di Blitar pada tanggal 15 Oktober 2018 pukul 09.36 WIB

Berdasarkan wawancara penulis dengan Roni Setiadi selaku masyarakat Kabupaten Blitar pada tanggal 15 Oktober pukul 14.23 WIB.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Rini selaku masyarakat Kabupaten Blitar pada tanggal 15 Oktober 2018 pukul 14.53 WIB

Berdasarkan wawancara penulis dengan Rudi Wibowo selaku pemilik usaha pom mini pada tanggal 31 Oktober pukul 12.03 WIB.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Sugeng Hariyanto selaku Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar pada tanggal 26 September 2018 pukul 11.10 WIB.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ruslan selaku Kepala Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar pada tanggal 11 Oktober 2018 pukul 10.35 WIB.

LAMPIRAN

Foto bersama Purwanto selaku Kepala Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen Disperindag Kabupaten Blitar



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018

Foto Bersama Sugeng Hariyanto selaku Staff Penerima Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen Disperindag Kabupaten Blitar



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018

Foto bersama Emiliana Rahmawati selaku Kasi Validasi Perijinan I Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018

Foto Bersama M. Nurhidayat selaku Kasi Penerbitan Perijinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar



Sumber: Dokumentasi penulis, 2018

Foto Bersama Ruslan selaku Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018

Foto bersama Suhardjono selaku Seksi Pengawasan Barang Beredar UPT. Perlindungan Konsumen Malang.



Sumber: Dokumentasi Penulis

Foto bersama Solikin selaku distributor pom mini



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018

Foto pemilik pom mini



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018

Foto pemilik pom mini



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018